



UN
DP

United Nations Development Programme Indonesia

Conflict Prevention and Recovery Unit



Program Pemulihan Maluku Utara dan Maluku

Laporan Kemajuan
Keempat

Januari
s/d Juni
2003

Program Pemerintah Indonesia dan United Nations Development Programme bekerjasama dengan Pemerintah Australia, Italia, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Swedia dan Inggris

Daftar Isi

DAFTAR ISI	2
PENDAHULUAN	3
TUJUAN DAN PENDEKATAN PROGRAM	3
STATUS KESELURUHAN KOMITMEN DAN PENCAIRAN DANA PROYEK.....	4
PROGRAM PEMULIHAN MALUKU UTARA.....	4
PROGRAM PROVINSI MALUKU UTARA	5
PROGRAM BERBASIS WILAYAH DI HALMAHERA UTARA	9
PROGRAM BERBASIS WILAYAH DI HALMAHERA SELATAN	15
UNITED NATIONS RESOURCE CENTRE - TERNATE	16
PROGRAM PEMULIHAN MALUKU	17
PENYESUAIAN STRATEGI PROGRAM	17
PROYEK YANG TENGAH BERJALAN DI MALUKU	18
PROYEK DALAM DAFTAR TUNGGU DAN PERKEMBANGAN LANJUTAN ATAS PROGRAM BERBASIS WILAYAH	21
PERMASALAHAN, TANTANGAN DAN PELAJARAN YANG DIPETIK	23
RENCANA JANGKA PANJANG UNTUK PERDAMAIAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	25
LAMPIRAN I : STATUS PROYEK (PER 30 JUNI 2002).....	26
LAMPIRAN II : SUSUNAN KEPEGAWAIAN (PER JUNI 2003)	30

Pendahuluan

Laporan ini merupakan laporan perkembangan keempat atas Program Pemulihan Maluku Utara dan Maluku, yang berisi rangkaian kegiatan Program yang mencakup selama periode Januari sampai dengan Juni 2003. Program ini secara langsung dilaksanakan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan telah disetujui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atas nama Pemerintah Indonesia. Mitra kerja UNDP dari pihak Pemerintah untuk Program ini adalah Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil).

Secara resmi, Program dimulai pada 26 September 2001 dan akan berjalan untuk periode tiga tahun hingga September 2004. Rencana anggaran Program mencapai USD 16 juta dan mendapat respon yang kuat dari pihak donor. Sampai saat ini, Pemerintah Australia, Italia, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Swedia dan Inggris telah memberikan komitmen kurang lebih USD 11,66 juta.

Tabel 1: Komitmen dan Penerimaan dari Pihak Donor

Donor	Komitmen (USD)	Penerimaan (USD)
Australia	257.550	257.550
Italia	896.787	896.787
Jepang	110.000	110.000
UNTF Jepang	1.415.529	1.415.529
Belanda	8.000.000	2.200.000
Selandia Baru	82.560	82.560
Norwegia	207.905	207.905
Swedia	194.175	194.175
Inggris	500.000	325.000
Total	11.664.506	5.689.506
Target Anggaran	16.194.500	
Belum diterima	4.529.994	

Tujuan dan Pendekatan Program

Program Pemulihan Maluku Utara dan Maluku merupakan prakarsa multi sektoral yang berfungsi untuk melengkapi usaha Pemerintah Indonesia dan pihak lainnya dalam memulihkan kondisi pasca konflik dan menciptakan perdamaian jangka panjang dan pembangunan yang berkelanjutan di Propinsi Maluku Utara dan Maluku, dan untuk menguatkan proses rekonsiliasi diantara masyarakat yang sudah mulai bertumbuh di kedua propinsi tersebut. Tujuan umum Program adalah untuk ikut serta membangun

masyarakat yang kuat secara sosial dan ekonomis, hidup bersama-sama secara berdampingan, bebas dari rasa takut dan dari kekerasan. Empat tujuan langsung Program adalah:

1. Pulangnya pengungsi kembali ke tengah masyarakat dalam suasana rekonsiliasi;
2. Perbaikan dasar prasarana dan sarana fisik di tingkat masyarakat dan pemberian jasa pelayanan umum secara efektif di wilayah-wilayah utama;
3. Menghidupkan dan menumbuhkan kegiatan sosial dan ekonomi dengan mengutamakan masyarakat yang rentan;
4. Penguatan dan pembentukan tata pemerintahan yang baik ditingkat lokal guna terbentuknya lembaga-lembaga yang inklusif dan bertanggungjawab yang efektif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

Strategi Program melibatkan dukungan di berbagai tingkat yang saling melengkapi. Strategi tersebut antara lain berupa pelaksanaan program ditingkat provinsi, dan pelaksanaan program berbasis wilayah yang terfokus di wilayah geografis prioritas. Program pembangunan berbasis wilayah sedang didukung di wilayah-wilayah geografis dimana kebutuhan dan potensi untuk menjembatani masyarakat agar dapat memfasilitasi transisi pembangunan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan berjangka panjang. Wilayah pertama pendekatan ini pernah diterapkan sejak 2002 adalah Kecamatan Galela, Tobelo dan Tobelo Selatan (Kabupaten Halmahera Utara). Program berbasis wilayah lainnya sedang dikembangkan pada 2003 di Bacan (Kabupaten Halmahera Selatan) di Maluku Utara, dan di Ambon, Maluku Tengah dan Maluku Tenggara di Maluku. Oleh karena terbatasnya daya serap di wilayah fokus, kegiatan program melengkapi program berbasis wilayah dengan dukungan yang signifikan ditingkat provinsi. Disamping program berbasis wilayah yang lebih terfokus di wilayah prioritas, program ditingkat provinsi dirancang untuk memberikan dukungan dengan cakupan geografis lintas wilayah provinsi yang lebih luas.

Program dilaksanakan melalui kemitraan dengan sejumlah mitra, termasuk departemen Pemerintah ditingkat provinsi

dan kabupaten, badan-badan PBB, LSM internasional, organisasi masyarakat madani di Indonesia, Dewan Desa, dan lain-lain. Program berupaya untuk menerapkan pendekatan yang strategis dan berimbang menuju kemitraan, dengan tujuan untuk menguatkan peran penting dan saling melengkapi yang dimainkan oleh berbagai sektor masyarakat dalam pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Ini meliputi, antara lain, kemitraan dengan pemerintah lokal dalam menguatkan praktek-praktek tata pemerintahan yang baik dan perencanaan pembangunan partisipatoris; kemitraan dengan sektor swasta untuk menguatkan praktek bisnis yang baik dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi; dan kemitraan dengan masyarakat madani untuk menguatkan peran yang dapat dimainkan oleh para LSM dan aktor-aktor masyarakat madani lainnya dalam mempromosikan perdamaian berjangka panjang dan pembangunan. Melalui pendekatan multi dimensi seperti ini, Program juga berupaya untuk mendukung pembangunan dan melembagakan hubungan kolaboratif diantara sektor masyarakat yang krusial dalam membangun landasan-landasan pemerintahan yang diperlukan untuk perdamaian yang kokoh/kuat.



Pihak penerima Program Perumahan Pemerintah bantuan UNDP di Yaba, Maluku Utara.

Program juga menjalin hubungan kerjasama dengan mitra internasional dalam mempromosikan strategi bersama, untuk menguatkan kapasitas lokal di bidang penciptaan perdamaian dan pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan itu, Program menekankan koordinasi keahlian dan sumber

daya internasional guna mencapai hasil yang lebih komprehensif (misalnya merehabilitasi sarana-sarana pendidikan dimana lembaga-lembaga lainnya memiliki sumber daya untuk pelatihan tenaga pengajar). Jika dibutuhkan, dan oleh karena keterbatasan daya serap dan ketrampilan teknis lembaga-lembaga lokal, Program juga akan mengajak mitra nasional dan internasional yang baru untuk berkiprah di provinsi Maluku Utara dan Maluku, dengan keahlian teknis dan kepentingan yang relevan untuk pembangunan untuk jangka panjang.

Status Keseluruhan Komitmen dan Pencairan Dana Proyek

Per 30 Juni 2003, Program Pemulihan Maluku Utara dan Maluku telah menyetujui lebih dari 60 proyek bernilai USD 7 juta. Dari jumlah total dana yang diperuntukkan bagi kegiatan sub proyek, USD 2,1 juta telah dicairkan per akhir Juni 2003.

Tabel 2: Komitmen dan Pencairan Dana

	Dana Komitmen	Dicairkan per Juni 2003
Maluku Utara		
Program ditingkat Provinsi	4.949.032	930.367
Program Berbasis Wilayah di Halmahera Utara	730.297	547.248
Program Berbasis Wilayah di Halmahera Selatan	--	--
Maluku		
Program ditingkat Provinsi	761.730	346.770
Program Berbasis Wilayah di Ambon	433.541	170.338
Program Berbasis Wilayah di Maluku Tengah	204.310	183.879
Program Berbasis Wilayah di Maluku Tenggara	--	--
Total	7.078.910	2.178.601

Program Pemulihan Maluku Utara

Kehadiran operasional Program di Propinsi Maluku Utara dimulai pada bulan Nopember 2001. Program di Maluku Utara sedang mendukung Program Berbasis Wilayah di kecamatan Galela, Tobelo dan Tobelo Selatan (Halmahera Utara). Program juga sudah mengawali langkah perencanaan

program berbasis wilayah yang kedua, yaitu di Pulau Bacan di daerah selatan provinsi (Halmahera Selatan). Kegiatan program ditingkat provinsi dirancang untuk mencakup wilayah geografis lintas provinsi yang lebih luas, dengan melengkapi program berbasis wilayah yang lebih terarah pada wilayah prioritas.

Program Provinsi Maluku Utara

Program ditingkat provinsi dijalankan melalui kemitraan dengan pihak Pemerintah, badan PBB lainnya, organisasi masyarakat madani, dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat. Sebelum masa periode laporan ini sepuluh (10) proyek tingkat provinsi dengan total nilai USD 4,0 juta telah disetujui. Selama masa periode laporan, Program telah mengembangkan lima proyek tambahan ditingkat provinsi, termasuk kemitraan baru dengan CARDI, World Vision/UNICEF, FAO dan UNESCO. Sedangkan proyek-proyek pada 2002 menekankan terutama pada perumahan, prasarana umum, dan pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung proses pemulihan dan pemulangan pengungsi ke tempat asal, maka proyek baru berupaya untuk menyempurnakan Program dengan menitikberatkan pada aspek pendidikan perdamaian, media, dan mata pencaharian.

Proyek yang sedang berjalan diawasi oleh kantor proyek di Ternate, ibukota Provinsi Maluku Utara. Kantor proyek tersebut secara kontinyu membina dan memelihara hubungan kerjasama dan koordinasi dengan kantor Pemerintah Provinsi dan Kabupaten terkait, selain dengan mitra pembangunan lokal dan internasional di Ternate.

Perumahan, Prasarana Umum dan Sarana Sosial: Program tengah merampungkan fase pertama proyek bantuan untuk Program Perumahan Pemerintah dalam rangka pemulangan pengungsi. Proyek tersebut menyalurkan bantuan bahan bangunan rumah dan uang tunai kepada 520 KK pengungsi (2.267 jiwa) dalam rangka memfasilitasi pemulangan mereka ke masyarakat asal di 21 desa di sembilan kecamatan (Jailolo, Jailolo Selatan, Sahu, Morotai Selatan,

Morotai Utara, Bacan Timur, Loloda Utara, Loloda, dan Gane Barat). Proyek ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dibawah pengarahannya Gubernur dan SATKORLAK PBP. Kegiatan pembangunan perumahan telah rampung di 13 dari 21 desa, dimana tingkat perampungan kegiatan pembangunan di delapan desa lainnya berkisar antara 75 hingga 95 persen. Menurut rencana, proyek ini akan rampung pada Juli 2003.

Selain itu, United Nations Office for Project Services (UNOPS) merintis kehadiran operasionalnya di Maluku Utara dalam rangka penyaluran bantuan berskala besar dibidang perumahan, prasarana umum, dan sarana sosial. Program ini beranggaran USD 3,3 juta dan penyaluran sumber daya untuk membantu rehabilitasi 1.400 unit rumah berikut perbaikan substantif terhadap prasarana umum dan sarana sosial terkait.

Dalam menjalankan Program ini, UNDP dan UNOPS bermitra dengan Pemerintah di berbagai tingkat LSM internasional dan lokal. Program ini menjalin hubungan koordinasi yang baik dengan berbagai departemen Pemerintah tingkat Provinsi dan Kabupaten (Dinas Sosial, Satkorlak/Satlak PBP, Bappeda, PMD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan), serta dengan mitra lainnya, dalam menseleksi desa dan pihak penerima dalam tahap perencanaan perumahan dan prasarana. Proyek akan menyalurkan bantuan ke seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara, dengan cara tidak menimbulkan konsentrasi secara berlebihan di daerah tertentu. Lokasi yang pasti dan alokasi prasarana dan sarana pembangunan akan ditentukan pada saat tahap perencanaan pembangunan kembali desa. Persiapan sosial, pengorganisasian masyarakat, dan perencanaan tingkat desa merupakan unsur-unsur penting proyek untuk memastikan bahwa investasi dalam perumahan, prasarana dan sarana dilakukan secara benar dan bahwa proses tersebut mendukung rekonsiliasi sosial, pertumbuhan ekonomi dan tata pemerintahan yang baik.

Dalam masa periode laporan, dua kiriman pertama bahan bangunan rumah non lokal (untuk 600 dari 1.400 unit rumah yang direncanakan) telah tiba di Ternate. Dinas

Sosial tingkat Provinsi menyalurkan dana dampingan untuk keperluan bahan bangunan rumah dan dana lauk-pauk untuk 846 paket rumah, dan Kabupaten Halmahera Tengah telah menyanggupi untuk membangun 200 unit rumah tambahan. Dana dampingan lainnya sedang dibahas dengan lembaga-lembaga Pemerintah terkait.



Pihak penerima Program Perumahan Pemerintah bantuan UNDP di Todowongi, Maluku Utara.

Selain itu, Lokakarya bertajuk "Bantuan Rekonstruksi Perumahan dan Prasarana di Maluku Utara" dilangsungkan pada 14 dan 15 Juli berkat kerjasama dengan Sekretaris SATKORLAK PBP. Hadir pada lokakarya tersebut adalah semua mitra dan yang berpotensi untuk menjalin kerjasama dalam kegiatan proyek ini, yaitu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, serta LSM internasional dan lokal. Lokakarya tersebut dimaksudkan sebagai forum tempat berbagi pengalaman, tantangan yang dihadapi, dan penyampaian gagasan baru dalam menanggapi permasalahan seperti kesenjangan kebijakan, rencana rekonstruksi tingkat desa, dan koordinasi antar pihak Pemerintah, LSM internasional, LSM lokal, dan badan-badan PBB dalam melaksanakan proyek perumahan dan prasarana di Maluku Utara. Hasil lokakarya juga membahas mengenai koordinasi, yaitu rekomendasi untuk dibentuknya Tim Koordinasi sebagai suatu forum diskusi proyek perumahan dan prasarana serta proyek-proyek terkait. Lokakarya tersebut juga membahas kriteria pemilihan desa.

Lokakarya tersebut juga sebagai basis untuk merampungkan Memorandum Kesepakatan bersama sejumlah mitra pelaksana proyek, termasuk Pemerintah

Kabupaten Halmahera Tengah dan LSM-LSM sebagai berikut:

- Catholic Organization for Relief and Development Aid (CORDAID): melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan penyaluran 400 paket rumah bagi pengungsi yang pulang dan kelompok masyarakat lainnya yang terkena dampak konflik di desa-desa di Bacan dan Obi di wilayah selatan provinsi;
- World Vision: merencanakan dan membangun kembali prasarana dan sarana sosial di desa tempat perumahan pernah diberikan, khususnya di kawasan utara provinsi, khususnya Jailolo Selatan, Tobelo, Galela dan Morotai;
- Lembaga Mitra Lingkungan (LML): untuk rekonstruksi bangunan sekolah dan peningkatan sanitasi lingkungan di satu desa, masing-masing di Jailolo dan Bacan, dan juga melakukan proses perencanaan pembangunan kembali di desa-desa terpilih.

Hubungan kemitraan selanjutnya sedang dikembangkan untuk penyaluran sisa paket rumah dan rekonstruksi prasarana dan sarana terkait, serta untuk melakukan perencanaan rekonstruksi desa. Untuk itu telah diadakan diskusi bersama CARDI dan sejumlah LSM lokal. Yang masih perlu dilakukan adalah pencapaian kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Halmahera Barat.

Community Rehabilitation Initiative (CARDI): Proyek baru bersama CARDI telah berjalan sejak Maret 2003 dan bertujuan untuk membantu pemulangan dan pemukiman di kawasan barat laut, barat dan baratdaya Halmahera, yaitu wilayah-wilayah yang sifatnya melengkapi proyek bantuan UNDP lainnya di Maluku Utara. Proyek tersebut melakukan kegiatan rehabilitasi di 15 desa melalui bantuan hibah untuk mendukung pelaksanaan proyek berskala kecil dibidang pengadaan air dan sanitasi, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan kembali sarana masyarakat termasuk gedung sekolah. Selain itu, CARDI akan mengadakan pelatihan dan memberikan masukan lainnya untuk mengembangkan kapasitas lokal dalam hal pelaksanaan proyek

didalam program, yaitu dibidang teknik partisipatif, disain proyek, monitoring dan evaluasi, dan manajemen keuangan. Untuk semua kegiatan tersebut kegiatan dikoordinasikan dengan departemen Pemerintah terkait ditingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan.



Konstruksi Polindes di Ngidiho, Galela, melalui bantuan IMC.

Proyek tersebut telah selesai melakukan kajian di wilayah baratdaya Halmahera (Gane Barat), dan wilayah barat Halmahera bagian tengah (Oba dan Oba Utara), dan telah merencanakan kajian untuk wilayah barat laut Halmahera (Jailolo, Ibu dan Sahu) yang akan dilaksanakan antara Juli/Agustus 2003. Tujuan utama proses kajian tersebut adalah mengidentifikasi masyarakat yang terkena dampak konflik yang belakangan dan/atau tengah mengalami kedatangan gelombang pengungsi yang pulang dan/atau pemukim yang akan dibantu melalui kegiatan proyek. Sembilan desa di Gane Barat yang lolos kriteria seleksi telah diprioritaskan untuk memperoleh bantuan, dan undangan pertama penyerahan usulan proyek untuk komunitas-komunitas tersebut telah dikeluarkan. Usulan-usulan tersebut tengah dikaji oleh CARDI dan seleksi akhir akan dilakukan pada Agustus 2003. Data hasil kajian wilayah barat Halmahera bagian tengah (Oba dan Oba Utara) tengah diolah untuk menetapkan desa-desa prioritas untuk undangan proposal kedua yang direncanakan Juli 2003. Identifikasi desa prioritas di wilayah barat laut Halmahera akan dilakukan berdasarkan hasil kajian Juli/Agustus 2003.

CARDI melaksanakan proyek secara langsung melalui struktur desa yang ada.

Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pembentukan struktur baru pemerintahan desa yang akan dan/atau telah dibentuk sesuai amanat UU No. 22 tahun 1999 tentang Desentralisasi. Bantuan pengembangan kapasitas secara non formal telah disalurkan kepada semua masyarakat yang teridentifikasi di Gane Barat, yaitu dibidang: partisipasi masyarakat, identifikasi kebutuhan prioritas, disain proyek, penulisan proposal, dan pengantar untuk panduan program. Bantuan pengembangan kapasitas secara formal akan ditentukan oleh usulan-usulan masyarakat yang telah disetujui, dan dapat meliputi pelatihan formal teknis dibidang air dan sanitasi, kebersihan, pembangunan kembali bangunan sekolah dan/atau ketrampilan mata pencaharian. Pelatihan lain berupa manajemen keuangan serta monitoring dan evaluasi proyek.

Bantuan Sektor Kesehatan: Paket bantuan untuk sektor kesehatan telah dilaksanakan melalui kemitraan dengan World Health Organization (WHO) dan aparat Pemerintah Kota tingkat provinsi, kabupaten dan di seluruh Provinsi Maluku Utara. Proyek-proyek tersebut telah menyalurkan bantuan langsung kepada program kesehatan Pemerintah, dimana WHO melakukan pengawasan teknis, monitoring dan pelaporan implementasi dana oleh Pemerintah. Proyek yang disetujui pada 2002 antara lain:

- Bantuan untuk merehabilitasi kesiapan kesehatan darurat dan sistem koordinasi Dinas Kesehatan Halmahera Tengah;
- Pemasangan insinerator di RS Ternate untuk mendukung penanganan limbah rumah sakit secara aman;
- Bantuan untuk kampanye vaksinasi yang dilaksanakan oleh aparat dari Dinkes tingkat kabupaten dan kota di Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate;
- Bantuan untuk pemulangan tenaga kesehatan secara sukarela melalui pengadaan insentif untuk mata pencaharian, kotak medis, dan bantuan sekolah bagi anak-anak mereka;
- Program sanitasi yang komprehensif untuk Kabupaten Maluku Utara dan Halmahera Tengah melalui pelatihan kepada petugas Puskesmas dan

sanitasi, yang kebanyakan adalah pengungsi yang baru pulang kembali;

- Selain proyek-proyek yang difasilitasi oleh WHO, sebuah proyek yang dilaksanakan International Medical Corps (IMC) pada 2002 membantu pengadaan tenaga dokter, pelayanan kesehatan dasar, suplai obat-obatan, dan peluncuran kampanye informasi di enam wilayah Maluku Utara (Kao, Tobelo, Galela, Daruba termasuk Pulau Rau, Bere Bere, dan Ternate).¹

Selain itu, pada 2003, sebuah proyek telah dibantu untuk penguatan kapasitas tenaga kesehatan Puskesmas dalam menurunkan angka kematian dan angka kesakitan akibat penyakit TBC dengan cara mematahkan rantai infeksi pasien TBC. Proyek ini, bekerjasama dengan WHO, memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan yang tersebar di 26 Puskesmas kecamatan di seluruh provinsi untuk diagnosa dan klasifikasi kasus, mengkaji kemajuan kondisi pasien TBC yang dirawat, dan pengambilan keputusan mengenai paket pengobatan untuk TBC untuk kasus-kasus berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Untuk itu, 36 unit mikroskop telah disalurkan kepada 36 Puskesmas guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan diagnosa yang tepat melalui pemeriksaan mikroskopis.

Pendidikan Perdamaian dan Media: Tiga proyek baru telah dikembangkan selama masa periode laporan yang terarah pada dukungan proses rekonsiliasi dan penciptaan perdamaian melalui pendidikan dan media. Proyek-proyek tersebut dimaksudkan untuk memperluas ruang lingkup kegiatan yang didukung oleh Program di seluruh Provinsi Maluku Utara untuk meningkatkan prospek perdamaian yang berkelanjutan.

UNDP dan UNICEF menjalin hubungan kemitraan dengan World Vision dalam meningkatkan kapasitas tenaga pengajar dalam pendidikan perdamaian. Tujuan proyek ini, yang dilaksanakan World Vision, adalah meningkatkan kualitas proses pembelajaran anak berdasarkan metodologi yang diterapkan UNICEF, yaitu "belajar

secara aktif, gembira dan efektif" (AJEL). AJEL bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih kaya, dimana para murid dapat memperoleh ketrampilan, ilmu pengetahuan, dan sikap yang akan menggalang hubungan yang rukun antar anak-anak. Dalam pelaksanaannya, proyek akan bekerjasama secara erat dengan Dinas Pendidikan.



Rehabilitasi SD INPRES di Upa, Tobelo Selatan, yang menguntungkan 157 murid.

Fokus proyek ini adalah pada pendidikan sekolah dasar di 35 SD yang tersebar di kecamatan Galela, Tobelo, Tobelo Selatan, Kao dan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara. Kegiatan yang akan dilakukan meliputi Pelatihan untuk Pelatih dan kegiatan pelatihan tenaga pengajar. Pelatihan metodologi AJEL tersebut akan melatih 210 guru dari Kabupaten Halmahera Utara, disamping sejumlah petugas Dinas Pendidikan. Lebih dari 2.000 murid sekolah dasar akan menerima manfaat dari peningkatan kualitas pendidikan melalui program pelatihan tersebut.

Memanfaatkan pengalamannya di Indonesia dan tempat lainnya, UNESCO merencanakan kegiatan percontohan "budaya damai" di Maluku Utara yang bertujuan untuk menggalang nilai, sikap dan perilaku menuju pemahaman atas masyarakat, toleransi dan solidaritas. Kegiatan UNESCO di Maluku Utara akan terfokus dalam mendukung serangkaian kegiatan dibidang media dan pendidikan. Kegiatan ini termasuk ditingkat Provinsi, dan meliputi pembentukan Pusat Media di Maluku Utara dan pelatihan-pelatihan media perdamaian bagi kalangan wartawan. Selain itu, proyek tersebut akan

¹ Proyek-proyek tersebut telah dilaporkan dalam Laporan Kemajuan Program Pemulihan Maluku Utara dan Maluku, Juli s/d Desember 2002.

mendukung pendirian komunikasi radio, pendidikan perdamaian, dan kegiatan sosial budaya di sejumlah kecil masyarakat percontohan. Kegiatan pendidikan perdamaian bertujuan untuk mengintegrasikan pendidikan perdamaian kedalam program melek huruf dan program pendidikan yang berkelanjutan, dengan penekanan kepada kelompok perempuan dan pemuda. Proyek juga akan melakukan kegiatan kreatif untuk pemuda (seni, budaya, perkemahan, media, dsb.) dalam meningkatkan toleransi antar kelompok.

Berkaitan dengan rencana kegiatan melalui UNESCO, UNDP juga merencanakan sebuah kampanye media untuk Maluku Utara dalam mendukung tujuan perdamaian dan rekonsiliasi dengan cakupan seluruh wilayah provinsi. Kampanye tersebut akan mendokumentasi dan mendiseminasi informasi mengenai perkembangan positif proses rekonsiliasi di Maluku Utara dengan bantuan dari Pemerintah, masyarakat madani, UNDP dan aktor-aktor internasional lainnya. Target utama kampanye adalah masyarakat Maluku Utara yang terkena dampak konflik serta pengungsi di Maluku Utara dan provinsi tetangga seperti Sulawesi Utara dan Maluku. Disamping pembuatan dan diseminasi media cetak, kampanye ini akan mendukung pengembangan paket materi audio dan penyebarluasan ke stasiun-stasiun radio lokal, regional dan nasional. UNDP telah mengeluarkan permohonan usulan untuk produksi dan diseminasi bahan kampanye, dan kini tengah mengkaji usulan-usulan dari beberapa LSM Indonesia dan organisasi media.

Bantuan Dibidang Ekonomi Rumah Tangga: Selain penyaluran bantuan dibidang rumah tangga pencaharian melalui program multi sektoral, seperti prakarsa pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan CARDI, UNDP tengah melakukan persiapan akhir untuk sebuah proyek dengan UN Food and Agricultural Organization (FAO) bermitra dengan Departemen Perikanan dan Pertanian. Proyek tersebut akan memberikan bantuan ekonomi rumah tangga kepada pengungsi yang bermukim dan penduduk rentan di selatan Maluku Utara, dan akan memanfaatkan dan memperluas proyek FAO yang tengah berjalan dengan bantuan

Pemerintah Belanda untuk membantu merehabilitasi sektor pertanian dan perikanan dengan tujuan untuk menopang ekonomi masyarakat pedesaan dan pesisir di Maluku Utara. Berdasarkan hasil positif dari proyek yang sudah berjalan tersebut, dan dalam rangka memperluas pencakupannya, Program Pemulihan Maluku Utara dan Maluku menyediakan dana tambahan untuk memproduksi sampan tambahan, mengadakan perlengkapan penangkapan ikan, dan menyelenggarakan pelatihan bagi nelayan agar dalam waktu singkat, kegiatan perikanan dapat pulih kembali setelah sempat terganggu akibat konflik pada 1999. Fokus utama proyek adalah kelompok-kelompok rentan di Pulau Bacan, dan oleh karena itu sifat proyek adalah melengkapi rencana Program Berbasis Wilayah di daerah Bacan.



Jaringan listrik yang telah direhabilitasi di Togoliwa, Tobelo.

Program Berbasis Wilayah di Halmahera Utara

Pada 2002, Program Berbasis Wilayah dengan cakupan kecamatan Galela, Tobelo dan Tobelo Selatan (Kabupaten Halmahera Utara) melakukan perencanaan dan siklus program yang menghasilkan sejumlah prakarsa hasil rekomendasi Dewan Musyawarah Pembangunan Masyarakat (DMPM), suatu badan yang terdiri dari unsur masyarakat madani dan Pemerintah.² Selama enam bulan pertama tahun 2003, fokus Program Berbasis Wilayah adalah

² Proses ini telah dijabarkan dalam Laporan Kemajuan Ketiga Program Pemulihan Maluku Utara dan Maluku, Juli s/d Desember 2002.

pada pelaksanaan proyek yang sedang berjalan, disamping verifikasi, pengembangan lanjutan dan peluncuran proyek hasil rekomendasi DMPM. Untuk itu telah dilakukan konfirmasi kebutuhan masyarakat target, pengumpulan informasi teknis tambahan, dan pertemuan dengan mitra penanggungjawab proyek yang diusulkan, termasuk departemen pemerintah, masyarakat dan LSM dalam rangka mengkaji lebih lanjut kapasitas mereka untuk melaksanakan proyek-proyek tertentu.

Program juga berupaya untuk memantapkan strategi dalam rangka mencapai keempat tujuan Program. Jika proyek-proyek terdahulu menekankan pada pekerjaan umum, prasarana dan rehabilitasi/konstruksi sarana umum (Tujuan Program No. 2) agar membantu pemulangan pengungsi (Tujuan Program No. 1), kini kegiatan Program lebih menekankan bantuan dibidang pengembangan kapasitas instansi utama pemerintah lokal (Tujuan Program No. 4), penciptaan pendapatan dan ekonomi keluarga (Tujuan Program No. 3), dan akses terhadap keadilan. Proyek dilaksanakan melalui kemitraan bersama pemerintah lokal, dewan desa, perusahaan kontraktor swasta, organisasi masyarakat madani, dan LSM internasional.

Kapasitas Pemerintah dalam Mendukung Pembangunan Perekonomian: Peningkatan strategi Program saat ini dilakukan untuk mengimbangi perkembangan yang terjadi di tingkat administrasi kabupaten dan kecamatan. Dalam rangka desentralisasi, kabupaten dan kecamatan di Maluku Utara telah dimekarkan. Pada 2002, Kecamatan Tobelo dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Tobelo dan Tobelo Selatan. Pada 2003, tiga kabupaten lama di Provinsi Maluku Utara (Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kotamadya Ternate) dimekarkan menjadi delapan kabupaten. Sebagai hasil dari proses kabupaten baru Halmahera Utara telah menjadi 9 (sembilan) kecamatan terdiri dari sembilan kecamatan, termasuk Galela, Tobelo dan Tobelo Selatan. Kota Tobelo ditetapkan sebagai ibukota Halmahera Utara, dimana Kupa-Kupa tampil sebagai ibukota baru kecamatan Tobelo Selatan. Di

Tobelo sedang dibentuk perkantoran Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Dalam rangka mendukung proses pemekaran tersebut dan pengembangan kapasitas dinas-dinas pemerintah yang baru terbentuk agar dapat memenuhi fungsinya, Program telah mengembangkan paket bantuan untuk sejumlah dinas Pemerintah Kabupaten yang bergerak di sektor-sektor utama yang berdampak langsung terhadap pembangunan dan pertumbuhan perekonomian setempat. Sumber daya dinas Pemerintah di daerah mempunyai keterbatasan dan kapasitas teknisnya perlu dimantapkan agar dapat mendukung masyarakat secara efektif. Oleh karena itu, UNDP merancang serangkaian proyek pengembangan kapasitas yang bertujuan untuk membantu empat Dinas yang baru terbentuk: (i) Pertanian, (ii) Peternakan, (iii) Perikanan, dan (iv) Perindustrian dan Perdagangan. Selain itu, masing-masing Dinas tersebut akan menerima dana bantuan untuk melaksanakan proyek hasil rekomendasi DMPM.

Melalui proyek pengembangan kapasitas, masing-masing dinas Pemerintah Kabupaten tersebut menerima bantuan berupa pendampingan teknis dari pakar United Nations Volunteer (UNV), pelatihan bagi sejumlah pejabat dinas, dana bantuan untuk menyelenggarakan empat hingga enam pelatihan tingkat desa yang difasilitasi pemerintah, pengadaan perlengkapan kantor dan perlengkapan lainnya untuk manajemen proyek dan pelaporan, dan sejumlah bantuan operasional. Menurut rencana Program akan memberikan dukungan pelatihan teknis bagi petugas Dinas dalam bentuk pengalaman terbaik dalam pengadaan barang dan pemberian kontrak secara adil, sistem monitoring dan pelaporan, disamping beberapa lokakarya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pejabat pemerintah dalam mendukung pemulihan sosial.

Penciptaan Pendapatan dan Mata Pencaharian: Sebagian besar keberhasilan proses rekonsiliasi dan pemulangan pengungsi akan tergantung pada kesejahteraan sosial perekonomian pengungsi yang pulang maupun

masyarakat secara umum. DMPM telah mengeluarkan rekomendasi untuk gelombang awal proyek-proyek dibidang pengembangan kapasitas kelembagaan organisasi perekonomian seperti koperasi, pelatihan, pengembangan UKM, dan akses terhadap kredit (melalui dana berputar). Bidang usaha yang ditangani proyek-proyek meliputi pertanian, perikanan, peternakan dan industri kecil. Masing-masing Dinas baru Pemerintah Kabupaten yang berkaitan dengan pembangunan perekonomian daerah mendapatkan alokasi dana bantuan untuk melaksanakan proyek penciptaan pendapatan dan mata pencaharian, selain dari bantuan pengembangan kapasitas yang disebutkan di atas. Proyek-proyek yang dimaksud disajikan di Tabel 3.

Untuk memperoleh hasil maksimal dari kegiatan pembangunan perekonomian di wilayah pasca konflik yang bersifat unik itu, proyek penciptaan pendapatan dan mata pencaharian dirancang sedemikian rupa sehingga akan memajukan dan menopang hubungan suportif antara kapasitas dan sumber daya terkait. Hal ini meliputi hubungan antara pihak penerima manfaat (petani, nelayan, atau kelompok industri kecil), sumber daya manusia dan tenaga teknis Pemerintah, keahlian dan pengalaman institut politeknik setempat, dan kapasitas keahlian dan pelatihan kepada Persatuan Perkreditan Rakyat

dalam bidang perencanaan keuangan dan manajemen keuangan masyarakat akar-rumpun.

Sebagai cara untuk merubah sikap dan metode kerja yang bersifat "pasrah dan apa adanya", masing-masing proyek kecil ini dibidang pertanian, perikanan, peternakan, dan industri kecil, mewajibkan penanaman kembali modal atau pemutaran bantuan kredit yang diberikan. Pihak penerima manfaat juga diminta untuk menjadi anggota koperasi, mengikuti pelatihan dan penyuluhan, dan membantu mereka yang telah atau akan menjadi anggota koperasi.

Prasarana dan Pekerjaan Umum Padat-Karya: Program Berbasis Wilayah telah melaksanakan sejumlah proyek prasarana. Yang patut dicatat adalah proyek yang dirampungkan Program pada Mei 2003, yaitu proyek rehabilitasi jaringan listrik yang rusak akibat konflik di kecamatan Galela dan Tobelo Selatan. Proyek tersebut menghasilkan pemasangan 93,5 km jaringan listrik baru, menyediakan tujuh unit gardu tiang baru, dan menguntungkan 49 desa atau sekitar 34.500 KK. Agar masyarakat dapat menerima manfaat secepat mungkin, 42 sambungan listrik telah dipasang ke sarana umum seperti sarana kesehatan, gedung sekolah, dan kantor Kepala Desa. Pekerjaan konstruksi dan pemasangan jaringan listrik ditangani

Tabel 3: Proyek Penciptaan Pendapatan dan Mata Pencaharian melalui Dinas Pemerintah Kabupaten.

Dinas Pemkab Halmahera Utara	Judul Proyek	Lokasi	Uraian
Dinas Perindag	Koperasi Penghasil Batu Bata	Desa Gomhoku, Tobelo Selatan	Merintis kembali usaha batu bata di Gamhoku; bantuan membentuk koperasi produsen.
Dinas Perindag	Pengembangan Kapasitas untuk Produksi Minyak Kelapa	Desa Upa, Tobelo	Mendirikan pabrik kecil, pelatihan untuk 25 buruh kasar (Kristen dan Muslim).
Dinas Perikanan	Funae dan Ketingting Tradisionil	Gamsungi, Tobelo; Upa dan Paca, Tobelo; Saluta, Galela	Pembentukan koperasi perikanan; pengadaan kapal nelayan tradisionil, joran dan motor untuk dua kelompok nelayan campyuran.
Dinas Perikanan	Koperasi Pajeko	Gamhoku, Tobelo Selatan; Salimuli, Galela	Koperasi nelayan akan dilatih. Pajeko dan joran akan diadakan melalui kredit berputar.
Dinas Peternakan	Koperasi Peternakan Ayam	Wari, Tobelo	Pelatihan anggota koperasi baru peternak ayam agar menghasilkan ayam sehat dan lebih mudah dipasarkan. Pengadaan ayam sebagai modal awal melalui sistem gaduhan.
Dinas Peternakan	Rehabilitasi Pelayanan Kesehatan Ternak Kabupaten	Kota Tobelo	Modal awal berupa pelatihan dan penyuluhan dalam menggunakan vaksin ternak.
Dinas Peternakan	Pemeliharaan ternak di Galela	Kecamatan Galela	Pelatihan dan pengadaan ternak bagi kelompok tani melalui sistem gaduhan; pendampingan dalam mendirikan koperasi.

CV. Gaya Teknik, sebuah perusahaan kontraktor di Ambon yang memenangkan proses tender. Proyek diserahkan kepada PT. PLN pada 31 Mei 2003 dalam suatu upacara di Desa Togoliwa. Kini PLN mengemban tanggungjawab operasional sistem.

Jaringan listrik yang telah direhabilitasi itu diharapkan akan memberi insentif positif bagi pengungsi untuk pulang kembali, dan untuk mendorong pengungsi yang telah pulang untuk terus menetap. Diharapkan juga bahwa jaringan listrik tersebut akan berkontribusi dalam pertumbuhan kegiatan sosial dan ekonomi ke kondisi normal, sekaligus memberikan warga rasa aman yang lebih besar. Selain itu juga diperkirakan bahwa pemulihan akses terhadap listrik itu akan berkontribusi terhadap pertumbuhan kegiatan sosial dan perekonomian daerah itu, selain berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan penanaman modal di masa mendatang. Berkaitan dengan hal tadi, proyek juga memasang jaringan tambahan di perkebunan pisang di Kabupaten Galela guna merangsang penanaman modal di daerah itu.



Pasar tradisional di Desa Kupa-Kupa, Tobelo Selatan.

Hingga saat ini, Program Berbasis Wilayah telah membantu serangkaian proyek prasarana lainnya, yang sebagian besar dilaksanakan kontraktor swasta yang memenangkan proses tender, dan sisanya dilaksanakan dewan desa. Proyek-proyek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Pembangunan Jembatan di Desa Gamsungi-1, Tobelo: Jembatan ini menggantikan jembatan kayu yang tidak dapat dilalui kendaraan, dan

menghubungkan 150 KK di Desa Gamsungi-1 dengan pasar utama Tobelo sehingga mempermudah mereka dalam memasarkan produk hasil bumi;

- Pembangunan Pasar Tradisionil di Desa Kupa-Kupa, Tobelo Selatan: Kupa-Kupa ditunjuk sebagai ibukota baru Kecamatan Tobelo Selatan. Karena kecamatan tersebut tidak memiliki sarana pasar, maka sebuah pasar tradisional dibangun di Kupa-Kupa untuk membantu desa tersebut tumbuh menjadi kawasan perekonomian;
- Rehabilitasi Saluran Air Limbah Desa Kupa-Kupa, Tobelo Selatan: Proyek ini merehabilitasi sistem saluran air limbah sepanjang 1.030 m itu guna mencegah banjirnya desa dan tergenangnya gedung sekolah yang berlokasi di daerah sekitarnya selama musim hujan. Penerima manfaat meliputi sekitar 400 anggota masyarakat;
- Pembangunan Lantai Pasar dan Terminal Minibus di Gamsungi I, Tobelo: Proyek ini merehabilitasi lantai yang rusak di pasar tradisional utama Tobelo dan lahan parkir yang bersebelahan dengannya, yang menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 300 orang per hari;
- Pembangunan Dermaga di Pulau Tolonuo: Akibat konflik, Desa Tolonuo yang berlokasi di sebuah pulau kecil yang terpencil tidak memiliki dermaga atau galangan kapal. Proyek ini membangun dermaga berukuran 72x2 m itu, dimana pihak penerima manfaat meliputi 53 KK Kristen dan 250 KK Muslim yang bermukim di Desa Tolonuo. Proyek ini telah merangsang kegiatan perdagangan dengan memfasilitasi transpor barang, dan pengangkutan penumpang dengan memfasilitasi transportasi kapal bagi pelajar sekolah, manula, dan sebagainya. Proyek ini dilaksanakan masyarakat dengan bantuan pos Marinir setempat, dan dengan demikian proyek ini juga bertujuan untuk menggalang hubungan kerjasama antar masyarakat dan militer setempat;
- Peluncuran tiga proyek baru yang dilaksanakan melalui kontraktor swasta, termasuk pembangunan MCK di Pasar Ikan Gamsungi, pembangunan kembali gedung Serikat Buruh Pelabuhan di

Tobelo, dan pembangunan jembatan di Togawa, Galela.

Pengadaan Air: Hingga sekarang, Program telah membantu sejumlah proyek pengadaan air bersih, yaitu:

- Proyek pertama, yang dilaksanakan Dewan Desa Duma, merehabilitasi sistem pengadaan air bersih di desa tersebut. Sumber air desa sebelumnya terdiri dari 12 sumur gali, yang masing-masing terkontaminasi dan terisi dengan sampah dan puing selama konflik. Program menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan untuk membersihkan ke-12 sumur tersebut dan memompa keluar air yang terkontaminasi. Sebanyak 370 KK, terdiri dari kurang lebih 1.525 jiwa, dan sejumlah pengungsi yang pulang kembali, memanfaatkan air bersih sebagai hasil proyek tersebut.
- Di desa Soatobaru, Dewan Desa melaksanakan proyek pemasangan sistem pengadaan air, yang akan menguntungkan 350 KK dari masyarakat Muslim maupun Kristen. Sistem pengadaan air bersih yang direncanakan terdiri dari satu sumur gali, satu tangki air utama berkapasitas 24 meter kubik, ditambah dua tangki kecil yang masing-masing berkapasitas 6 meter kubik, yang ditempatkan di wilayah Muslim dan Kristen di desa itu.
- Selanjutnya, satu proyek penyaluran dana hibah kecil di sejumlah daerah untuk membantu rehabilitasi ringan sistem pengadaan air bersih, melalui dana untuk pengadaan perlengkapan atau biaya tenaga buruh. Proyek dana bantuan ini akan mengakomodasi kegiatan proyek pengadaan air bersih berskala kecil di tujuh desa. Dua proyek tambahan mulai berjalan melalui kesepakatan dengan KIMPRASWIL, dimana proyek pertama merehabilitasi sistem pengadaan air bersih di Togoliwa, Tobelo Selatan, dan yang kedua adalah merehabilitasi sistem pengadaan air bersih di Ruko, Tobelo Selatan.

Pekerjaan Umum Padat-Karya: Program Berbasis Wilayah telah melaksanakan sejumlah proyek pekerjaan umum padat-karya. Tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan prasarana desa, mencipta-

kan lapangan kerja sementara, dan menyuntik uang kedalam perekonomian lokal guna memfasilitasi kondisi sosial perekonomian menuju pemulihan, dan memajukan rekonsiliasi dengan mempekerjakan tim buruh gabungan (Muslim-Kristen). Proyek-proyek ini meliputi kegiatan pembersihan puing, rehabilitasi ringan prasarana, rehabilitasi sumur sarana pengadaan air lainnya, dan lain-lain.

Proyek-proyek prasarana dan pekerjaan umum padat-karya tersebut dilaksanakan oleh UNDP, kontraktor swasta dan/atau Dewan Desa. Sejumlah proyek prasarana dan pekerjaan umum padat-karya berskala kecil, menurut rencana akan dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum Provinsi (DPUP) dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten (DPUK) yang baru terbentuk itu. Sebuah MoU telah ditandatangani bersama KIMPRASWIL untuk pelaksanaan lima proyek prasarana berskala kecil yang akan dimulai pada pertengahan 2003.



Mempersiapkan konstruksi dermaga di Pulau Tolonuo.

Rehabilitasi Sarana Pelayanan Umum: Prasarana dan pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah Galela-Tobelo-Tobelo Selatan mengalami tingkat kerusakan yang cukup parah. Sebagai bagian dari tahap perencanaan program dibidang kesehatan dan pendidikan, pada 2002 UNDP melakukan kajian komprehensif terhadap sarana di semua desa di kecamatan Galela, Tobelo dan Tobelo Selatan. Hasil kajian tersebut dimanfaatkan Program dan DMPM dalam mengembangkan rencana dan proyek bantuan dibidang pendidikan dan kesehatan di Galela, Tobelo dan Tobelo Selatan.

Dua proyek rehabilitasi gedung sekolah tengah berjalan. Proyek pertama adalah pembangunan kembali sekolah di Soatobaru, Galela, yang memiliki empat ruang kelas sebagai pengganti sekolah yang dirusak akibat konflik, dengan menguntungkan 253 anak usia sekolah. Proyek kedua adalah penambahan tiga ruang kelas pada gedung Sekolah Dasar INPRES di Upa, Tobelo Selatan, yang menguntungkan 157 murid. Per akhir Juni 2003, kedua proyek tersebut rampung sekitar 50 persen. Tujuh proyek sekolah tambahan direncanakan, yaitu rehabilitasi gedung, konstruksi ruang kelas tambahan, sarana perpustakaan, pengadaan perabotan dan perlengkapan, dan bantuan pengembangan kapasitas. Proyek-proyek tersebut mencakup tiga kecamatan (Galela, Tobelo, Tobelo Selatan). Mitra penanggungjawab proyek adalah pengurus sekolah, Dewan Desa, dan Dinas Pendidikan. Proyek rehabilitasi sekolah akan dilengkapi dengan pelatihan pendidikan perdamaian bagi tenaga pengajar lewat suatu proyek gabungan World Vision/UNICEF/UNDP yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Utara.

Sebuah proyek yang dilaksanakan secara kemitraan dengan International Medical Corps (IMC) juga mulai bergulir pada 2002 yang bertujuan untuk memulihkan fungsi sarana kesehatan di Galela, Tobelo dan Tobelo Selatan. Proyek ini membantu merehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pondok Bersalin Desa (Polindes). Melalui peningkatan pemberian pelayanan kesehatan akan lebih mampu dalam menangani kesehatan dasar dan kebutuhan sehat dalam reproduksi masyarakat desa, dan juga diharapkan dapat memfasilitasi pemulangan pengungsi ke daerah tersebut. Sebanyak 10 sarana telah direhabilitasi atau dikonstruksi, dan perlengkapan medis, perabot, dan pasokan obat-obatan telah disalurkan ke semua kecuali satu Pustu (sarana kesehatan di Tobe masih kekurangan obat-obatan). IMC telah melakukan serah terima seluruh sarana tersebut kepada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Selain rehabilitasi sarana pendidikan dan kesehatan, Program Berbasis Wilayah berencana untuk membantu pembangunan tiga balai rakyat: yang pertama adalah di ibukota kabupaten Kota Tobelo, dan dua

lainnya di ibukota kecamatan Galela (Kota Galela) dan Tobelo Selatan (Kupa-Kupa). Proyek tersebut akan membantu ketiga lokasi ini tumbuh sebagai kawasan sosial dan perekonomian daerah masing-masing. Pelaksanaan proyek balai rakyat akan ditangani langsung oleh Pemerintah di daerah.



Turnamen olahraga "Bangun Persaudaraan Cup I".

Pemberdayaan Sosial Budaya dan Pemuda: Program Berbasis Wilayah telah membantu sejumlah proyek bantuan melalui Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) cabang Galela, Tobelo dan Tobelo Selatan, dan panti asuhan Rumah Sejatera dan Elisa, dalam rangka memberdayakan pemuda lewat kegiatan budaya dan olahraga. Bantuan tersebut meliputi perayaan Hari Pemuda Nasional pada 2002, yang sebagian disponsori oleh Program dan diikuti oleh sekitar 1.500 pemuda-pemudi. Selain itu, pada awal 2003 Program membantu "Bangun Persaudaraan Cup I", turnamen olahraga lintas masyarakat yang berlangsung selama sebulan yang dilaksanakan oleh KNPI. Turnamen tersebut dibentuk sebagai alat untuk menciptakan suasana bersahabat bagi sejumlah besar pengungsi untuk mengunjungi kembali kampung halaman, dan untuk memulihkan kepercayaan pengungsi terhadap masyarakat asal mereka. Sebanyak 34 kesebelasan sepakbola dan 12 tim bola voli berpartisipasi, termasuk tim pengungsi dari Ternate, Morotai dan Sulawesi Utara. Selain itu, satu proyek kecil disetujui untuk membantu kegiatan Pramuka di Tobelo dengan Dinas Pendidikan dalam menggiatkan kembali gerakan Pramuka dan memajukan rekonsiliasi di daerah itu.

Komentar tentang "Bangun Persaudaraan Cup I"

"Acara ini luar biasa! Sudah tiga tahun kita tidak punya acara olahraga. Kita dengar Tobelo sudah damai sekarang tapi kita belum yakin sampai kita datang sendiri ke sini."

- Quwetly Alweny, anggota tim PS. Banteng, Ternate, saat berpose di depan spanduk timnya yang berbunyi: "Kami datang untuk menjadi juara persaudaraan, dan perdamaian."

"Dengan berpartisipasi dalam even ini, kita bukan saja bisa bertemu kawan lama, tapi juga mendapat kawan baru yang berasal dari mana saja. Turnamen juga tempat kita bisa unjuk kemampuan profesional dan saling bersaing. Tapi sekarang saatnya kita untuk menunjukkan sikap sportifitas sejati dan mendukung proses rekonsiliasi dan perdamaian. Kalah menang tidak penting bagi kami."

- Jeffry Manginbulude, pemain sepakbola berusia 20 tahun dari FC. Solideo, Tobelo.

Kesadaran Hukum: Program Berbasis Wilayah tengah mengembangkan proyek untuk membantu Pengadilan Negeri (PN) Tobelo dalam merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan kampanye kesadaran hukum secara luas di seluruh daerah. Fokus kampanye adalah mengembangkan kesadaran penduduk desa terhadap hak mereka dan hak tetangga mereka dalam hal permasalahan utama dibidang sosial dan hukum akibat konflik. Kegiatan kampanye akan menangani permasalahan hukum dan sosial yang lazim ditemui di daerah pasca konflik itu, sekaligus memberikan informasi kepada penduduk desa mengenai pilihan-pilihan dan perkantoran dimana mereka mendapatkan akses hak hukum. Kegiatan yang dimaksud meliputi Pelatihan untuk Pelatih, penyiapan bahan, pengembangan rencana pelatihan, dan pelaksanaan kampanye di sejumlah desa sasaran di ketiga kecamatan Galela, Tobelo and Tobelo Selatan. Permohonan usulan telah dikeluarkan untuk sebuah lembaga yang akan menyediakan bantuan teknis kepada PN Tobelo pada saat pelaksanaan proyek

ini. Selain itu, Program Berbasis Wilayah tengah berada pada tahap awal pengembangan proyek untuk mendukung pelaksanaan penciptaan kesadaran hak asasi manusia yang menargetkan masyarakat daerah ini.

Program Berbasis Wilayah di Halmahera Selatan

Setelah melakukan konsultasi ekstensif dengan pemerintah lokal dan pihak berkepentingan lainnya, Pulau Bacan yang terletak di Kabupaten Pulau Halmahera Selatan telah diidentifikasi sebagai lokasi yang kedua Program Berbasis Wilayah dukungan UNDP di Maluku Utara. Rekomendasi dan keputusan tersebut dididarsi atas sejumlah faktor, termasuk perlu diseimbangkannya sumber daya Program antara wilayah utara dan selatan Provinsi Maluku Utara. Sebagai awal, Program Berbasis Wilayah di Bacan akan mengarahkan fokus pada tiga kecamatan, yaitu Bacan Utara, Bacan dan Bacan Timur. Sebanyak 22 desa di ketiga kecamatan tersebut terkena dampak langsung konflik.



Jaringan listrik yang rusak di Bacan.

Pada Mei 2002, staf Program melakukan kunjungan ke Bacan bersama perwakilan Pemerintah dalam rangka melakukan kajian pendahuluan sebelum melaksanakan kegiatan program di pulau tersebut. Tim kunjungan melanjutkan proses pengumpulan data dasar dan identifikasi kebutuhan utama dan permasalahan yang mempengaruhi pembangunan sosial dan perekonomian masyarakat. Hasil kajian tersebut akan dimanfaatkan sebagai masukan untuk proses perencanaan program yang lebih luas untuk pengembangan strategi dan intervensi,

termasuk pendekatan pendampingan yang melibatkan mitra yang sesuai dan pihak berkepentingan lainnya.

Perumusan Program di Bacan akan dibuat berdasarkan pengalaman dan pelajaran yang dipetik dari kegiatan program dukungan UNDP di daerah-daerah seperti Galela, Tobelo and Tobelo Selatan, dan Maluku Tenggara (melalui Program Penciptaan Perdamaian di Pulau Kei). Mekanisme perencanaan, pengambilan keputusan, dan penetapan prioritas sedang ditentukan dengan bantuan pengarahannya pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagian besar fokus Program adalah pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan, dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat madani dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan Pemerintah. Kemungkinan hal ini akan meliputi bantuan bagi dinas-dinas tingkat kabupaten dan LSM lokal dalam bidang manajemen program dan perencanaan partisipatif untuk pemberdayaan masyarakat.

Tim kunjungan mengidentifikasi sejumlah bidang prioritas untuk kemungkinan dibantu, yang akan dibahas lebih lanjut dengan Pemerintah dan pihak berkepentingan lainnya. Bidang tersebut meliputi: pembangunan kembali sarana kesehatan, sekolah, dan perumahan; pengadaan perlengkapan medis dan obat-obatan; penyaluran bantuan untuk industri lokal (termasuk produksi gula merah dan minyak kelapa); penyaluran bantuan untuk sektor perikanan dan pertanian; rekonstruksi prasarana transportasi; dsb.

Hasil konsultasi awal dengan pihak Pemerintah dan masyarakat mengindikasikan perlunya bantuan dan distribusi listrik, UNDP juga melakukan kajian pendahuluan terhadap rehabilitasi sistem jaringan listrik publik yang rusak selama konflik. Rehabilitasi sistem tersebut, yang dilakukan di awal pelaksanaan Program Bacan, akan menciptakan kondisi yang kondusif untuk pemulihan dan penanganan kendala pemulangan dan pemulihan secara berkelanjutan. Pemulihan sistem listrik sekaligus akan meningkatkan administrasi Pemerintah dan pelaksanaan pelayanan publik, memberikan keamanan

yang lebih baik, dan menciptakan kesempatan baru untuk pengembangan UKM. Selain itu, rehabilitasi tersebut memiliki dampak ganda dimana sektor swasta dapat menjadi tertarik untuk menanamkan modal baru di daerah itu.

Bantuan pendampingan di Bacan sedang disalurkan melalui proyek-proyek di Provinsi, yang meliputi daerah Bacan, termasuk Program Perumahan Pemerintah yang membantu pemulangan pengungsi, dan bantuan kepada sektor perikanan melalui FAO yang bermitra dengan Dinas Perikanan dan Pertanian.

United Nations Resource Centre - Ternate

UN Resource Centre telah beroperasi sejak 2001 untuk memfasilitasi pelaksanaan program dan proyek dukungan PBB. Hingga akhir 2002, sarana tersebut dikelola oleh Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). Dalam konteks pergeseran yang terjadi di Maluku Utara dari fase kemanusiaan ke fase pemulihan pasca konflik, pada 2003 tanggungjawab administratif UNRC di Ternate telah beralih dari OCHA ke UNDP. Pergeseran tersebut didasari atas pengarahannya lembaga dan organisasi lainnya, baik yang terdapat di Provinsi Maluku Utara maupun Jakarta, dan berdasarkan dukungan kuat yang diterima UNDP untuk mengelola UNRC.

UNRC berfungsi sebagai sarana kantor proyek umum, yang menyediakan pelayanan pendukung dan sumber daya umum untuk proyek dan program yang didukung badan-badan PBB di Maluku Utara. Selama enam bulan pertama 2003, UNRC telah memfasilitasi berbagai kunjungan bersama PBB/Pemerintah, kunjungan donor, dan kunjungan LSM internasional dan mitra proyek ke Maluku Utara. UNRC juga telah membantu badan-badan PBB dalam menetapkan kehadiran mereka di Maluku Utara. Selama periode laporan, hal tersebut meliputi: pembukaan kantor baru UN Field Security Officer, yang ditempatkan di Ternate pada Mei; perintisan kehadiran proyek FAO di Maluku Utara; pembukaan kantor proyek UNOPS dalam rangka membantu proyek perumahan dan prasarana UNDP; dan penyaluran bantuan kepada kalangan LSM

internasional seperti Médecins Sans Frontières (Belgia) dan Church World Service (CWS). UNRC juga membantu penyelenggaraan acara dan lokakarya FAO, UNOPS dan pihak lainnya di Maluku Utara. Selain itu, UNRC menghasilkan sumber daya informasi, seperti ikhtisar media, ikhtisar informasi kegiatan badan-badan PBB di Maluku Utara, dan masukan-masukan bagi laporan situasi OCHA.

Program Pemulihan Maluku

Komponen Maluku dari Program Pemulihan Maluku Utara dan Maluku merintis kehadiran operasionalnya di Ambon pada Oktober 2002. Program Pemulihan ini telah terfokus pada pengembangan Berbasis Wilayah dan serangkaian kegiatan tingkat provinsi. Pilihan daerah Program Berbasis Wilayah ditentukan atas dasar konsultasi dengan Pemerintah dan pihak berkepentingan lainnya. Berdasarkan kajian substantif terhadap keadaan yang ada di provinsi, Program memilih Wilayah basis di Kotamadya Ambon (Sirimau, Nusaniwe, Teluk Ambon Baguala), Maluku Tengah (Kota Masohi, Tehoru, Seram Barat, Wahai, Kairatu, Amahai) dan Maluku Tenggara (Kei Kecil, Kei Besar).

UNDP tengah membuka sejumlah kantor proyek untuk mendukung kegiatan program di daerah-daerah tersebut. Kantor proyek UNDP di Ambon menyatu pada kantor UNRC yang baru di Ambon (Gedung Kenzo), yang diresmikan pada April 2003. Program di Maluku Tenggara memanfaatkan prasarana program dan sarana kantor Program Penciptaan Perdamaian Kepulauan Kei dukungan UNDP, yang beralih menjadi bagian dari struktur manajemen Program Pemulihan Maluku per akhir 2002. Menurut rencana, Program akan membuka sub kantor di Maluku Tengah pada pertengahan Juli di kantor Bappeda di Masohi.

Penyesuaian Strategi Program

Selama masa periode laporan, Program berhasil menjalin hubungan kerjasama dengan Pemerintah dan pihak berkepentingan lainnya, demikian halnya atas jalinan kerjasama dengan sejumlah aktor pembangunan di Maluku. Kegiatan konsultasi sedang berlangsung dalam

rangka menyesuaikan strategi dan prioritas kegiatan Program di Provinsi Maluku.

Selain itu, melihat tingkat kompleksitas dan dinamika konflik Maluku, pada akhir 2002 UNDP menyetujui usulan pelaksanaan studi analisa konflik yang bertujuan untuk memberikan masukan pada proses perencanaan dan strategi Program di Maluku. Studi ini, yang dilaksanakan Institute for Social Transformation (INSIST), dirancang untuk meningkatkan pemahaman tentang faktor struktural, proksimat dan pemicu konflik Maluku agar Program didasarkan pada suatu kajian yang mengupas tuntas dampak potensial intervensi terhadap dinamika perdamaian dan konflik.

Tim riset INSIST melakukan kegiatan lapangan di Maluku berikut riset konvensional melalui penerapan teknik penelitian partisipatif seperti diskusi kelompok terarah dan wawancara mendalam dengan masyarakat yang terkena dampak konflik. Disamping konsultasi dengan masyarakat, pertemuan-pertemuan juga dilakukan dengan tokoh formal dan non formal, tokoh agama dan adat, dan karyawan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, INSIST bermitra dengan Institute for Democracy Education (IDE) dan sejumlah organisasi lokal di Maluku dibawah koordinasi Baileo Maluku, suatu jaringan organisasi yang terdiri dari unsur penduduk asli dan organisasi masyarakat.

Meski laporan akhir studi tersebut baru akan diluncurkan pada Agustus, hasil sementara menunjukkan beberapa pokok permasalahan yang merupakan kunci penguatan kondisi menuju pemulihan berkelanjutan dan perdamaian jangka panjang, yaitu:

- Meningkatkan kapasitas pemerintah untuk dapat merespon kebutuhan lokal, dan untuk dapat menerapkan asas partisipatif, akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan dalam rangka memastikan bahwa pengendalian dan pengelolaan sumber daya lokal berlangsung secara lebih demokratis dan adil;

- Mengembangkan kapasitas adat dalam menangani hubungan sosial dan menyelesaikan perselisihan;
- Memberdayakan masyarakat untuk melakukan dialog dengan Pemerintah, dan untuk berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan dan penetapan prioritas;
- Memadu model-model berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan keamanan manusia yang mengutamakan penekanan pada tatalaksana pemerintahan dan partisipasi dalam penegakkan hukum dan akses terhadap keadilan;
- Meningkatkan pemahaman terhadap situasi dan kebutuhan kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan, seperti pemuda dan perempuan, dan memberi kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
- Memajukan nilai-nilai kebersamaan, keadilan dan toleransi antar kelompok melalui dukungan dan bantuan bagi kegiatan media dan pendidikan;
- Mendukung penyatuan kembali pengungsi kedalam masyarakat dalam lingkungan yang aman dan saling-dukung.

Satu seminar dilangsungkan di Ambon pada 24 Juni 2003. Seminar tersebut bertujuan untuk menyajikan kepada para pihak lokal tentang perkembangan terakhir status dan arah Program, guna menyediakan forum mendiskusikan tujuan, strategi, pendekatan, asas dan modalitas kemitraan. Tujuan lainnya adalah untuk memperoleh umpan-balik dari pihak lokal yang berkepentingan. Seminar tersebut dihadiri sekitar 120 peserta, termasuk perwakilan Pemerintah, TNI/POLRI, kelompok agama, media, Universitas, LSM lokal, LSM internasional, badan-badan PBB, dan lain-lain.

Seminar tersebut telah memberi peluang bagi pihak lokal yang berkepentingan untuk mengetahui tujuan-tujuan Program dan melayangkan pertanyaan kepada UNDP dan mitra-mitranya mengenai ruang lingkup dan kegiatan Program di Maluku. Seminar ini juga menjadi forum untuk menyajikan hasil sementara studi INSIST. Para peserta

sangat senang dengan seminar tersebut, dimana peserta memberikan masukan dan umpan-balik yang berharga yang akan dipertimbangkan dalam proses penyesuaian strategi yang dilakukan terus-menerus terhadap Program di Provinsi Maluku.³

Proyek yang Tengah Berjalan di Maluku

Sampai dengan 30 Juni 2003, Program Pemulihan Maluku telah menyetujui 11 proyek dengan nilai total kurang-lebih USD 1,4 juta. Proyek-proyek tersebut dilaksanakan melalui kemitraan dengan Pemerintah Kotamadya, LSM dan organisasi masyarakat madani, LSM internasional, organisasi PBB, dan lain-lain. Sejalan dengan hasil konsultasi dengan dan hasil sementara studi INSIST, proyek-proyek tersebut berupaya untuk menyalurkan bantuan kepada berbagai sektor, seperti penguatan ekonomi masyarakat, pemulangan pengungsi secara berkelanjutan, pengembangan kapasitas media, dan perluasan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Prakarsa-prakarsa penting yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:⁴



Lokakarya Informasi Mutakhir Program, Amans Hotel, Ambon, 24 Juni 2003.

Mendukung Stabilitas, Pemulangan Pengungsi dan Penguatan Ekonomi di Maluku: Sejak 2002 UNDP menjalin hubungan kemitraan dengan Mercy Corps dalam rangka membantu pemulangan pengungsi dan para keluarga yang terkena dampak konflik di kabupaten Maluku

³ Hasil seminar selengkapnya dijabarkan dalam laporan terpisah.

⁴ Daftar lengkap proyek disajikan di Lampiran I.

Tengah dan Ambon. Mercy Corps menjalin kerjasama dengan sejumlah LSM lokal dalam menjalankan kegiatan yang membantu pemulangan pengungsi secara aman, berkelanjutan dan sukarela, dengan cara menyediakan kebutuhan pokok pengungsi dan para keluarga yang terkena dampak konflik.

Per Oktober 2002,⁵ Mercy Corps telah mendanai lima sub proyek melalui organisasi lokal yang menguntungkan lebih dari 2.070 orang penerima manfaat. Proyek-proyek tersebut meliputi kegiatan yang mempersatukan murid sekolah Muslim dan Kristen, seperti lomba seni, pembelajaran tentang toleransi dan kepelbagaian (perbedaan), serta kegiatan dan turnamen olahraga. Proyek-proyek lain secara langsung telah membantu keputeraan pengungsi, yaitu melalui rehabilitasi gedung-gedung sekolah dan penyediaan perlengkapan sekolah.

Mercy Corps juga menjalin kerjasama dengan sejumlah organisasi lokal guna mendukung proyek-proyek penguatan ekonomi/sumber pencaharian (kredit mikro, perikanan, pertanian, industri rumah tangga, produksi dasar, dan pelatihan ketrampilan) untuk para keluarga yang terkena dampak konflik. Per Oktober 2002, Mercy Corps telah mendanai serangkaian kegiatan termasuk dua proyek kredit mikro, dua proyek perikanan, delapan paket membiayai sejumlah LSM lokal untuk menghadiri konferensi nasional tentang kredit mikro di Jakarta, dan satu paket hibah untuk mensponsori bersama sebuah lokakarya tentang "Lembaga-Lembaga yang Bergerak dalam Pemberdayaan Usaha Kecil-Menengah (UKM)". Kegiatan-kegiatan tersebut menguntungkan 637 KK secara langsung dan 3.375 jiwa secara tidak langsung.

Suata amandemen terhadap perjanjian Mercy Corps-UNDP kini sedang diselesaikan guna memperpanjang masa periode dan lingkup geografis proyek. Perpanjangan proyek ini akan menyediakan dana tambahan yang memungkinkan Mercy Corps untuk meningkatkan fokusnya pada pengembangan kapasitas mitra masyarakat madani. Proyek tersebut juga berkait

⁵ Berdasarkan laporan terkini Mercy Corps.

dengan Balai Komunitas LSM lokal yang dibentuk oleh Mercy Corps di Ambon untuk diserahkan secara bertahap kepada LSM lokal, sementara keberhasilan dari Pusat Komunitas LSM ini akan direplikasi dengan pembentukan Pusat Komunitas LSM kedua di Tual, Maluku Tenggara.

Meningkatkan Pemulihan Masyarakat dan Pemulangan secara Berkelanjutan Lewat Proses Penciptaan Perdamaian: Sejak akhir 2002, UNDP menjalin hubungan kemitraan dengan International Catholic Migration Commission (ICMC), yang berfokus pada peningkatan pemulihan masyarakat dan pemulangan pengungsi secara berkelanjutan di Seram, Maluku Tengah. Proyek ini berupaya untuk meningkatkan proses penciptaan perdamaian lewat proses musyawarah antara pengungsi dan masyarakat asal sebelum konflik, dan mengembangkan rencana-rencana aksi bersama.



Musyawarah ICMC di kecamatan Taniwel. Tiga desa pengungsi dan satu desa pra-konflik bertemu untuk pertama kali menyusul gelombang pengungsian.

Per Juni 2003, sekitar 85 kelompok masyarakat (komunitas) (2.600 KK, atau 13.000 jiwa) memetik manfaat dari proyek ICMC tersebut. ICMC dan mitra-mitranya memfasilitasi 292 musyawarah antara pengungsi dan masyarakat asal sebelum konflik. Hasilnya, empat desa pengungsi memulai proses pemulangan, dua komunitas pengungsi pulang untuk pertama kali sejak konflik, dan lebih dari 500 pemuda dari 42 masyarakat pengungsi dan masyarakat asal bergabung dalam berbagai kegiatan.

Proyek ini sekaligus memfasilitasi pengembangan rencana aksi bersama, yang

disajikan kepada DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta aktor pembangunan lainnya. ICMC dan mitra-mitranya juga membentuk Tim Advokasi dan telah bertemu dengan Pemerintah Tingkat Provinsi dan Kabupaten dan DPRD dalam rangka menggalang sumber daya untuk kegiatan pemulihan masyarakat sasaran. Sebanyak 42 komunitas-masyarakat pengungsi/pra-konflik memperoleh bantuan pengadaan air dan sanitasi, pemberdayaan ekonomi, dan/atau bantuan bagi kelompok pemuda berkat upaya advokasi yang difasilitasi ICMC tersebut.

Proyek ini juga mengembangkan kapasitas kelembagaan delapan LSM lokal yang bertekad untuk meningkatkan keahlian program dibidang intervensi pemulihan masyarakat dan penciptaan perdamaian. Manfaat yang diterima kedelapan LSM tersebut adalah lima pelatihan yang disponsori proyek dibidang analisa konflik, teknik advokasi, perencanaan program dan akuntabilitas keuangan.

Perencanaan Skenario Ambon 2010: Lembaga Partisipasi Pembangunan Masyarakat (LPPM) dan Universitas Pattimura (Unpatti) tengah merancang rencana skenario yang akan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan di Maluku dengan tujuan mencapai visi bersama mengenai masa depan provinsi. UNDP bersama British Council (dengan dana dari Kedutaan Besar Inggris) telah membantu proses tersebut melalui penyaluran dana dan fasilitasi sejumlah lokakarya tentang rancangan proses perencanaan skenario. Hasilnya adalah suatu proses dan usulan yang disepakati bersama yang terdiri dari tiga komponen utama: (i) kegiatan perencanaan skenario, (ii) strategi informasi/komunikasi dan (iii) pengembangan kapasitas kelembagaan. Komponen (i) akan dilaksanakan oleh suatu Kelompok Kerja Perencanaan Skenario melalui LPPM. Komponen (ii) akan ditenderkan. Komponen (iii) akan dilaksanakan British Council. Proyek ini akan membantu UNDP dan mitra-mitranya dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dianggap pihak yang berkepentingan sebagai permasalahan utama yang dihadapi Maluku. Diharapkan bahwa hasil kegiatan ini akan melengkapi

hasil analisa konflik yang dijalankan INSIST.

Penguatan Rekonsiliasi melalui Pengembangan Pendidikan di "Zona Rekonsiliasi" Kotamadya Ambon: UNDP menjalin hubungan kemitraan dengan Pemerintah Kotamadya Ambon (Kantor Walikota) dalam rangka membantu sektor pendidikan, yang ingin dijadikan sebagai titik masuk upaya penguatan rekonsiliasi. Delapan sekolah (4 SD, 2 SMP dan, 2 SMU) di "Zona Rekonsiliasi" Ambon menjadi target proyek. Jumlah murid sasaran adalah 2.778 dengan jumlah tenaga pengajar 239 orang. Proyek ini merehabilitasi sarana sekolah - yang kedepan akan berfungsi sebagai tempat pertemuan rekonsiliasi, pengadaan perabot sekolah dan alat belajar, pendaftaran murid baru untuk tahun ajaran 2003, dan meningkatkan mutu proses pembelajaran lewat penyediaan dana untuk menyelenggarakan berbagai acara dan kegiatan yang mendorong kerukunan dan solidaritas. Karena sekolah-sekolah di Ambon terpisah-pisah akibat konflik, proyek ini secara sengaja mengadopsi strategi yang mendorong rekonsiliasi antar umat beragama melalui konsep "Orang Basudara" (Being Brothers One To Another).

Penguatan Rekonsiliasi melalui Pengembangan Pendidikan, Perluasan Pelayanan dan Peningkatan Kualitas Sekolah-Sekolah Muhammadiyah: Sudah lama Muhammadiyah berkibrah dalam dunia pendidikan bagi masyarakat Ambon, baik yang beragama Kristen maupun Muslim. Banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah rusak dan kegiatan belajar mengajar terhenti selama konflik. Proyek ini memiliki tiga komponen. Pertama, membantu membangun kembali gedung SMU Muhammadiyah Ambon yang rusak akibat konflik. Kedua, proyek juga menyelenggarakan program magang "Akselerasi Pendidikan", suatu program yang dirancang untuk membantu murid mengejar ketertinggalan akibat konflik. Ketiga, proyek ini membantu pelaksanaan pendidikan dalam jabatan (in-service training) mengenai asas pendidikan Muhammadiyah, penyelenggaraan pelatihan guna meningkatkan kualitas pendidikan, dan pelembagaan program

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).

Pengembangan Media Maluku: Sebuah proyek yang membantu pengembangan media di Maluku sedang dijalankan oleh Media Development Loan Fund (MDLF) bekerjasama dengan sebuah jaringan radio di Jakarta (Radio 68H) dan mitra lokal, yaitu Maluku Media Centre (MMC). Proyek ini merespon pada tiga bidang yang paling mendesak bagi perkembangan media Maluku. Pertama, akses media yang terbatas menyebabkan sejumlah besar sektor penduduk tidak memiliki informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai isu lokal dan nasional. Kedua, ketrampilan dan pengalaman mereka yang bekerja di media lokal di Maluku adalah relatif rendah. Ketiga, hanya dalam jumlah kecil media yang beri fokus pada peningkatan budaya yang toleran dan tanpa kekerasan. Proyek ini membantu pembentukan sejumlah stasiun pemancar radio di tiga kabupaten di Maluku yang saat ini tidak memiliki media lokal: Buru, Maluku Tenggara Barat dan Maluku Tengah. Bantuan untuk meningkatkan perkembangan media yang sudah ada akan dilakukan melalui bantuan kepada Maluku Media Centre (MMC) serta melalui serangkaian pelatihan intra perusahaan (in-house training) dan magang yang intensif bagi pemancar-pemancar pilihan, perjalanan studi komparatif bagi editor (Pemred) dari dua media cetak terkemuka, dan melakukan survei pendengar radio. Dorongan untuk keterlibatan media dalam upaya peningkatan solusi konflik tanpa kekerasan akan dilakukan melalui penyediaan serangkaian program dan layanan himbuan masyarakat yang memajukan toleransi yang akan dipancarkan oleh stasiun radio lokal. Proyek ini akan berjalan secara sinergis dengan kampanye media Maluku Utara yang tengah dicanangkan Radio 68H tersebut di atas.

Proyek dalam Daftar Tunggu dan Perkembangan Lanjutan Atas Program Berbasis Wilayah

Selain proyek-proyek di atas, konsultasi dengan Pemerintah dan mitra pembangunan nasional dan internasional lainnya yang berkenaan dengan prakarsa prioritas yang dicanangkan untuk Program

di Maluku kini terus berlangsung. Kegiatan yang masih berada dalam daftar tunggu ini diupayakan untuk memperkuat dukungan karakteristik Berbasis Wilayah di daerah-daerah sasaran Ambon, Maluku Tengah dan Maluku Tenggara, yang akan dilengkapi dengan bantuan pada tingkat Provinsi. Dukungan kepada sejumlah proyek yang masih dalam daftar tunggu tersebut kini tengah menunggu ketersediaan dana.

Ditingkat Provinsi Maluku, Program ini merencanakan untuk melengkapi kegiatan di wilayah provinsi yang tengah berlangsung yang membantu pemulihan dan pemulangan pengungsi (Mercy Corps), analisa konflik (INSIST), perencanaan skenario (LPPM) dan pengembangan media (MDLF), ditambah dengan kegiatan tambahan dibidang tata pemerintahan yang baik dalam perencanaan pembangunan, dialog kebijakan pengungsi, serta dialog antar umat beragama.

Bersama Unpatti dan Bappeda, Program tengah membahas proyek perencanaan skenario dengan lingkup geografis seluruh provinsi untuk meningkatkan perencanaan pembangunan dalam rangka pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Menurut rencana, proyek perencanaan skenario tersebut akan dilaksanakan oleh sebuah tim yang terdiri dari perwakilan Unpatti dan Bappeda, dengan bantuan teknis dari International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), Enschede, Netherlands.

Satu dokumen konsep juga tengah dikembangkan untuk membantu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dalam membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang menangani kebutuhan pengungsi. Konsep tersebut telah mendapat tanggapan yang sangat baik dari Ketua DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten. Idenya adalah untuk mendekatkan DPRD dengan masyarakat pemilih guna dapat mempengaruhi kebijakan untuk menjawab kebutuhan riil pengungsi. Juga diusulkan agar semua Pansus memiliki perwakilan dari kelompok pengungsi. Dokumen konsep tersebut mengusulkan keterkaitan antara Pansus dan LSM sehubungan dengan pengungsi, yang akan menjadi saluran bagi LSM menyediakan Pansus dengan bahan-

bahan yang berbasis informasi dan memfasilitasi kunjungan lapangan.⁶

Semua upaya di tingkat Provinsi ini kemungkinan akan dilengkapi dengan bantuan penguatan dialog antar umat beragama ditingkat Provinsi. Secara bersama, tokoh-tokoh agama Islam, Kristen Protestan dan Katolik tengah membahas pengembangan kegiatan untuk mendukung butir-butir kesepakatan Perdamaian Malino yang ditandatangani pada 12 Februari 2002 di Malino, Sulawesi Selatan, dan guna menggalang dukungan masyarakat bawah terhadap perjanjian tersebut.

Untuk Program Berbasis Wilayah di Kotamadya Ambon, disamping hubungan kemitraan lain yang sudah terjalin, Program berencana untuk menjalin hubungan kemitraan dengan Pemerintah Kotamadya Ambon dan Muhammadiyah dalam rangka menguatkan kapasitas kelembagaan lokal dan membantu pelayanan publik dan pekerjaan prasarana yang berprioritas tinggi di Kotamadya Ambon. Sebuah proyek pengembangan kapasitas tengah dibahas dengan Institute for Good Governance and Regional Development (IGGRD) yang dimaksudkan untuk menguatkan lembaga-lembaga lokal dalam kerangka UU No. 22 tahun 1999, khususnya di Ambon, yang secara strategis akan dihubungkan dengan proyek peningkatan perencanaan pembangunan dengan cakupan seluruh provinsi yang akan dilaksanakan secara bersama dengan Unpatti dan Bappeda.

Menanti ketersediaan dana, Program juga merencanakan untuk meminta pengajuan "Request for Proposal" (RFP) Usulan untuk Proyek yang membantu penanganan limbah rumah tangga dan limbah rumah sakit di Kota Ambon. Konflik di Ambon telah menyebabkan terganggunya sistem penanganan limbah, yang pada saat ini hampir tidak berfungsi. Ditambah dengan tingkat kepadatan penduduk yang cepat karena gelombang masuk pengungsi, keadaan ini merupakan ancaman kesehatan dan lingkungan yang serius. Proyek ini berupaya untuk memulihkan pelayanan penanganan limbah di wilayah Kotamadya, menjawab kebutuhan-kebutuhan khusus

dalam bidang penanganan limbah rumah sakit, penanganan limbah rumah tangga dan pengembangan kapasitas. Proyek ini diprakarsai UNICEF yang melaksanakan survei dan perancangan proyek. Peningkatan lainnya dalam prasarana untuk pendidikan tinggi juga tengah dibahas bersama mitra-mitra potensial antara lain, kemungkinan pelaksanaan program kemitraan bersama Universitas Kristen Maluku (Kristen) dan Universitas Darussalam (Islam), yang melibatkan pembangunan kembali dan rehabilitasi bersama kampus masing-masing.

Menurut rencana akan dilakukan pengembangan Program Berbasis Wilayah untuk Maluku Tengah. Diskusi masih berlangsung bersama pihak lokal yang berkepentingan mengenai kegiatan dalam kerangka UU No. 22 tahun 1999 untuk memperbaiki/menyempurnakan Peraturan-peraturan Daerah (Perda) guna membentuk Badan Pembangunan Desa (BPD) sebagai bagian dari proses perencanaan Program Berbasis Wilayah di Maluku Tengah. BPD akan didorong untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan pembangunan untuk diajukan kepada Bappeda Kabupaten, yang lantas melakukan penetapan prioritas lebih lanjut sebelum mengajukannya ke DPRD untuk persetujuan. Menurut dokumen konsep, tujuan proyek ini menekankan pada penguatan pengambilan keputusan dan kemampuan lobi masyarakat sebagai bagian dari peningkatan efisiensi perencanaan pembangunan. Proyek ini akan terkait erat dengan proyek-proyek Unpatti/Bappeda dan IGGRD dalam rangka pemupukan saling belajar dan mendukung.

Kerjasama awal di Seram, Maluku Tengah, sedang berjalan melalui International Catholic Migration Commission (ICMC), guna meningkatkan pemulihan masyarakat dan pemulangan pengungsi secara berkelanjutan melalui proses penciptaan perdamaian (seperti disebutkan di atas). Bantuan tersebut perlu diiringi dengan bantuan lanjutan dalam masyarakat yang dituju (pulang), dan perencanaan tengah berjalan untuk kemungkinan membantu pengadaan air, sanitasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi rumah tangga dan keuangan mikro bagi pengungsi yang pulang dan masyarakat.

⁶ Lanjutan pengembangan dari konsep proyek itu ditunda hingga pemilihan Gubernur yang akan berlangsung pada Agustus 2003.

Mengikuti berbagai masukan dari Seminar Informasi Mutakhir Program Pemulihan Maluku, Juni 2003, maka direncanakan penyelenggaraan lokakarya mengenai program kredit mikro pada akhir Agustus di Ambon, dengan maksud mengembangkan strategi kredit mikro untuk Program yang terfokus pada pengungsi yang pulang di Maluku Tengah. Pihak yang berkepentingan dan mitra potensial akan diundang untuk berpartisipasi dalam lokakarya. Setelah lokakarya akan dikeluarkan permintaan pengajuan Usulan untuk Proyek. Konsepnya adalah menggunakan sarana kredit sebagai insentif bagi pengungsi untuk pulang dan bagi masyarakat yang dituju dan menerima mereka dengan semangat rekonsiliasi. Proyek tersebut juga memerlukan partisipasi LSM lokal untuk menyediakan kemampuan teknis dan dukungan untuk mengembangkan rencana usaha yang layak.

Untuk Maluku Tenggara, Program Berbasis Wilayah selanjutnya di kabupaten ini akan memanfaatkan hasil yang dicapai Program Penciptaan Perdamaian Kepulauan Kei dukungan UNDP yang didanai Pemerintah Belanda (Nomor Proyek UNDP INS/00/023). Program dua tahunan ini dilaksanakan di Kepulauan Kei oleh Yayasan Pemulihan Keberdayaan Masyarakat/YPKM (Community Recovery Programme/CRP) dari Juni 2001 hingga Juni 2003. Kegiatan selanjutnya kini sedang dirancang guna menindaklanjuti pembangunan masyarakat yang dilakukan CRP, serta program tambahan yang terarah pada prasarana. Program Berbasis Wilayah di Maluku Tenggara juga memanfaatkan kegiatan pengembangan media yang dilaksanakan MDLF, dan kegiatan pengembangan kapasitas LSM lokal yang didukung Mercy Corps, termasuk pembentukan Balai Komunitas LSM di Tual, Maluku Tenggara.

Lebih lanjut, Program berencana untuk memanfaatkan sarana VSAT di kantor UNDP Ambon guna menyediakan akses informasi bagi masyarakat luas. Menurut rencana, proyek warung Internet akan menargetkan sejumlah lapisan masyarakat, termasuk pelajar, LSM, sektor swasta dan pegawai pemerintah. Sistem subsidi silang akan diterapkan dimana pemakai akan dikenakan tarif yang berbeda yang

tergantung pada pendapatan mereka, yakni pelajar akan dikenakan tarif lebih rendah daripada pelaku bisnis dan pegawai pemerintah. Suatu rencana bisnis telah dikembangkan guna menjamin kelangsungan hidup proyek sesuai operasi UNDP.

Permasalahan, Tantangan dan Pelajaran yang Dipetik

Program tengah menyelesaikan tahun kedua dari tiga tahun periode, dan kini berada pada tahapan dimana UNDP berupaya meningkatkan pelaksanaan strategi Program dalam rangka mencapai keempat tujuan Program. Selama tahap awal, Program menitikberatkan fokus bantuan pada bidang-bidang prasarana dan pelayanan publik untuk mempersiapkan lingkungan yang layak bagi pengungsi yang pulang (Tujuan Program 1: Pemulangan pengungsi, dan 2: Rehabilitasi dasar prasarana fisik masyarakat dan pengadaan pelayanan publik secara efektif), karena bidang-bidang tersebut yang waktu itu paling mendesak untuk bantuan UNDP.

Pada tahapan sekarang, ada kebutuhan dan cakupan yang besar untuk meningkatkan bantuan dibidang sumber mata pencaharian yang berkelanjutan dan tata pemerintahan yang baik (Tujuan Program 3: Menghidupkan dan menumbuhkan kegiatan sosial dan ekonomi, dan 4: Penguatan dan pembentukan tata pemerintahan yang baik ditingkat lokal guna terbentuknya lembaga-lembaga yang inklusif dan terakunkan), selain intervensi dibidang pendidikan perdamaian, media, akses terhadap keadilan, dsb. Proyek-proyek yang sudah disetujui dan yang berada dalam daftar tunggu di Maluku dan Maluku Utara, dimaksudkan untuk "menyempurnakan" strategi Program agar lebih fokus pada permasalahan-permasalahan yang akan memiliki dampak lebih panjang dalam hal pencegahan konflik dan pembangunan berkelanjutan.

Penyempurnaan strategi Program yang kini sedang berjalan juga dimaksudkan untuk memanfaatkan kesempatan guna menguatkan tata pemerintahan lokal menyusul perkembangan terakhir dalam pelaksanaan desentralisasi di Maluku dan Maluku Utara. Untuk Maluku Utara, perkembangan yang dimaksud adalah:

- Pemilihan dan pengucapan sumpah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur baru pada akhir 2002;
- Disetujuinya UU Pemekaran Provinsi oleh DPR RI, yang memekarkan Kabupaten dan Kecamatan Provinsi;
- Penunjukan Bupati Pejabat untuk kabupaten-kabupaten baru oleh Menteri Dalam Negeri pada Mei 2003;
- Pencabutan status darurat sipil Maluku Utara melalui Keppres No. 27 yang dikeluarkan pada Mei 2003;
- Pengurangan pasukan TNI secara bertahap dari Maluku Utara, dimana pasukan TNI dengan kekuatan penuh hanya ditempatkan di daerah yang dianggap berpotensi konflik yang tinggi, seperti Tobelo, Galela, Kao, Malifut, dan Jailolo; dan,
- Serah terima Komando Operasi Pengendalian dan Pemulihan Keamanan (Koopslihkam) dari TNI kepada POLRI dalam suatu upacara yang diadakan di kantor Gubernur pada Juli 2003.

Sering terjadinya perubahan dan ketidakpastian administrasi pemerintahan pada masa awal periode pasca konflik menimbulkan tantangan bagi program dalam menyalurkan bantuan dibidang tata pemerintahan dan administrasi publik. Perkembangan-perkembangan positif belakangan ini telah menciptakan cakupan yang lebih luas bagi UNDP. Upaya-upaya yang tengah berjalan terarah pada dukungan terhadap pembentukan kantor-kantor Pemerintah Kabupaten yang baru di daerah-daerah prioritas (yaitu daerah-daerah dimana UNDP mendukung Program Berbasis Wilayah, termasuk Kabupaten hasil proses pemekaran, Halmahera Utara dan Halmahera Selatan). Bantuan tersebut mencakup dua bidang pengembangan kapasitas melalui bantuan teknis, pelatihan, pengembangan kelembagaan, demikian juga dengan dana kepada kantor-kantor dinas teknis Pemerintah untuk melaksanakan proyek-proyek yang berada dalam ruang lingkup Program ini.

Program di Maluku juga mengembangkan rencana untuk melaksanakan serangkaian upaya/inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan dan metode-metode pelaksanaan di berbagai jenjang dalam rangka implementasi UU No. 22 tahun 1999

tentang Otonomi Daerah, serta prakarsa untuk menguatkan pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan permasalahan pengungsi. Keberhasilan Pemilihan Gubernur di Maluku, yang menurut rencana akan belangsung pada Agustus 2003, akan menciptakan ruang lingkup tambahan pekerjaan dalam kegiatan tata pemerintahan di Provinsi Maluku.

Sementara kegiatan Program terus meningkat, Program mulai menuai/memetik pelajaran (hikmah) dari kegagalan, baik dari segi pelaksanaan Program secara keseluruhan maupun dari proyek-proyek yang dilaksanakan dalam kerangka Program. Segala upaya tengah dilancarkan untuk mengintegrasikan pelajaran yang dipetik tersebut kedalam pendekatan dan strategi Program guna memastikan bahwa kegiatan-kegiatan program dialaskan pada pengalaman dan suatu pemahaman atas keberhasilan yang sudah dicapai dan tantangan yang dihadapi.

Sebagai contoh, proses penciptaan perdamaian yang dilakukan oleh ICMC di Maluku menjadi sumber pengalaman dan pelajaran yang berharga untuk memahami tantangan yang dihadapi dan keberhasilan yang dicapai dalam suatu proses rekonsiliasi. Hasil dari proyek tersebut mampu meningkatkan pemahaman tentang proses-proses dan strategi dalam menyiapkan pengungsi dan masyarakat pra-konflik untuk pulang, dan berhasil menyoroti arti penting untuk menyatupadukan metode adat dalam mempertemukan masyarakat untuk membahas kepentingan masyarakat yang lebih besar (seperti unsur-unsur dalam gerakan "Baku Bae"). Selain itu, pengalaman ICMC menyoroti peran penting dan manfaat positif "berbagi informasi" (information sharing) bersama masyarakat pengungsi dan masyarakat yang sudah pulang mengenai sumber daya dan rencana pembangunan, dan perlunya dikembangkan metode-metode untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan tindak-lanjut berdasarkan informasi tersebut.

Selanjutnya, tingginya jumlah dan tanggapan positif peserta dalam seminar di Ambon pada bulan Juni 2003 menunjukkan manfaat positif yang dapat dipetik jika

membuka kesempatan yang lebih luas bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk ikut terlibat dalam diskusi mengenai tujuan, ruang lingkup dan kegiatan Program. Seminar tersebut juga menciptakan kesempatan untuk mendapatkan umpan-balik dan masukan berharga dalam rangka menyempurnakan strategi Program. Keberhasilan dalam seminar tersebut memberikan pelajaran berharga bagi Program dalam hal pelaporan, dimana lokakarya dinilai menjadi bagian kunci dari kegiatan pelaporan proyek dalam rangka membuka kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk membahas pelajaran dan pengalaman yang dipetik dan menyusun strategi kegiatan program untuk masa mendatang.

Rencana Jangka Panjang untuk Perdamaian dan Pembangunan Berkelanjutan

Kegiatan Program di Provinsi Maluku dan Maluku Utara kini berada pada tahapan dimana UNDP melihat kedepan dalam rangka membangun kerjasama dengan para mitra kerja untuk suatu strategi jangka panjang di dua provinsi tersebut. Semula, Program ini direncanakan sebagai program pemulihan transisi untuk secara lancar mendukung peralihan dari yang bersifat bantuan menuju pelaksanaan pembangunan, dan untuk menyediakan kerangka kerja bagi donor dalam memberikan kontribusi untuk membantu proses pemulihan saat kondisi darurat menyurut dan potensi untuk strategi program jangka panjang menguat. Meski beberapa daerah di kedua provinsi ini masih berada dalam situasi peralihan dari yang bersifat bantuan kemanusiaan menuju pelaksanaan pembangunan, daerah lainnya kini sudah cukup stabil untuk memungkinkan strategi jangka panjang dalam rangka meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan mencegah pecahnya kembali konflik di masa depan.

Dalam rangka merancang strategi jangka panjang untuk fase program selanjutnya di daerah ini, UNDP mulai melakukan proses konsultasi dan dialog dengan pihak Pemerintah, donor dan mitra pembangunan mengenai bantuan jangka panjang untuk mencapai perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di Maluku dan Maluku Utara.

Sebagai bagian dari proses ini, UNDP melaksanakan kajian terhadap Program Maluku Utara dan Maluku pada September-Oktober 2003 untuk menentukan arah strategi di masa mendatang. Kajian tersebut akan memiliki empat tujuan yang saling terkait:

1. Mengkaji arah strategi dan metode operasional Program Pemulihan Maluku Utara dan Maluku dalam rangka mencapai tujuan yang terkandung dalam dokumen proyek;
2. Menganalisa situasi terkini di Maluku dan Maluku Utara dan mengkaji tingkat relevansi tujuan-tujuan program sekarang ini berdasarkan situasi terkini dan kebutuhan yang teridentifikasi;
3. Memberikan rekomendasi dan menyajikan arah alternatif strategi masa mendatang, kelompok target, metode kerja dan modalitas kemitraan untuk fase berikut program, menguraikan langkah-langkah perencanaan yang dibutuhkan untuk merealisasikan fase berikut tersebut;
4. Memberikan rekomendasi mengenai strategi untuk meningkatkan partisipasi para pihak kunci yang berkepentingan setempat di kalangan Pemerintahan, masyarakat madani dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program dukungan UNDP, dan untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap proses dan hasil program.

Proses kajian akan meliputi kegiatan konsultasi dengan serangkaian mitra pembangunan, seperti Pemerintah, masyarakat donor, badan PBB lainnya, organisasi nasional dan internasional, dan lain-lain, serta kegiatan lapangan untuk bidang-bidang yang menjadi sorotan program. UNDP juga akan melaksanakan lokakarya bagi mitra-mitra guna meninjau dan membahas temuan-temuan kajian, strategi alternatif masa mendatang, dan langkah-langkah perencanaan masa mendatang.

Lampiran I: Status Proyek (Per 30 Juni 2002)

Daftar Proyek di Maluku Utara

No.	KODE PROYEK	JUDUL PROYEK	WILAYAH TARGET	MITRA	STATUS	TOTAL KOMITMEN	TOTAL PEMBAYARAN	PROYEKSI	No.	KODE PROYEK
				PENANGGUNGJAWAB PROYEK			(Per 30-11-02)	PEMBAYARAN (Pada 12/02)		
1	NM-001	Program Medis dan Kesehatan Reproduksi untuk Masyarakat Malut	Kec Tobelo & Galela	IMC	3	Apr-02	Juni-02	Rampung	76.448	65.909
2	NM-002	Promosi Rekonsiliasi dan Bantuan untuk Ekonomi Lokal melalui Kegiatan Kelolaan Bersama Pembersihan Puing dan Reruntuhan secara Padat Karya di Gamsungi 1 – Tobelo	Kota Tobelo	UNDP	1	Mei-02	Juni-02	Rampung	4.854	4.422
3	NM-003	Perbaikan Sarana Kesehatan Masyarakat Fungsional di Kecamatan Tobelo dan Galela di Malut	Kec Tobelo & Galela	IMC	8	Jan-02	TBD	Rampung	242.298	121.149
4	NM-005	Pemajuan Rekonsiliasi dan Penyaluran Bantuan untuk Ekonomi Lokal melalui Kegiatan Kelolaan Bersama Pembersihan Puing dan Reruntuhan dan Rehabilitasi Ringan Sistem Drainase Air Hujan secara Padat Karya di Gamsungi 1 – Tobelo	Kota Tobelo	UNDP	1	Jan-02	Aug-02	Rampung	14.421	13.514
5	NM-006	Pelengkap Proyek Kesiap-siagaan Kesehatan Darurat Dukungan WHO melalui Reparasi Perlengkapan Komunikasi dan Sarana Transportasi, dan Suplai sejumlah Perlengkapan Elektronik Kantor - Halteng	Kab Halteng	Dinkes Kab Halteng & WHO	1	Jan-02	Nov-02	Rampung	11.341	11.205
6	NM-007	Fase I Kegiatan Pemajuan Rekonsiliasi dan Bantuan untuk Ekonomi Lokal Wilayah Kecamatan Galela melalui Pembersihan Puing dan Reruntuhan secara Padat Karya di Enam Desa yang terkena Dampak Konflik pada 2000	Kec Galela	UNDP	2	Juli-02	Sep-02	Rampung	28.803	28.456
7	NM-008	Pemajuan Rekonsiliasi dan Penyaluran Bantuan untuk Ekonomi Lokal di Wilayah Kecamatan Tobelo Selatan melalui Pembersihan Puing dan Reruntuhan secara Padat Karya di Togoliwa dan Gamhoku	Kec Tobelo Selatan	UNDP	1	Mei-02	Mar-02	Rampung	8.034	7.937
8	NM-009	Pemasangan Insinerator untuk Penanganan Limbah secara Aman di RS Ternate	Kota Ternate	RS Ternate & WHO	2	Jan-02	Jan-02	Rampung	18.756	18.530
9	NM-010	Pemajuan Rekonsiliasi dan Penyaluran Bantuan untuk Ekonomi Lokal melalui Pembersihan Tumbuh-tumbuhan di Bawah dan Sekitar Jaringan Listrik di Kecamatan Tobelo Selatan dan Galela	Kec Tobelo Selatan & Galela	UNDP	1	Agu-02	Sep-02	Rampung	4.206	3.964
10	NM-011	Penyaluran Bantuan untuk Mobilisasi Lapangan Petugas Dinkes Malut dan Dinkes Kotamadya Ternate untuk Vaksinasi Campak dan Poliomyelitis di Daerah Terpencil	Kab Malut & Kotamadya Ternate	WHO	3	Okt-02	Okt-02	Rampung	43.129	40.650

No.	KODE PROYEK	JUDUL PROYEK	WILAYAH TARGET	MI TRA	STATUS	TOTAL KOMITMEN	TOTAL	PROYEKSI	No.	KODE PROYEK
				PENANGGUNGJAWAB PROYEK			PEMBAYARAN (Per 30-11-02)	PEMBAYARAN (Pada 12/02)		
11	NM-013	Penyaluran Bantuan untuk Mobilisasi Lapangan Petugas Dinkes Halteng untuk Vaksinasi Campak dan Poliomyelitis di Daerah Terpencil	Halteng (daerah terpencil)	WHO	70 hari	Jan-02	Sep-02	Rampung	6.643	6.261
12	NM-014	Pemberdayaan Dewan Musyawarah Pembangunan Masyarakat	Kec Tobelo & Galela	UNDP	12	Okt-02	Okt -03	Rampung	21.263	7.763
13	NM-015	Kerjasama Pemerintah Malut-UNDP dalam Pemulangan Pengungsi Melalui Penyaluran BBR	Prov Malut	Pemerintah	6	Okt -02	Aug-02	Berjalan	506.098	443.716
14	NM-016	Rehabilitasi Jaringan Listrik di Kecamatan Tobelo dan Galela	Kec Tobelo & Galela	CV Gaya Tehnik	120 hari kerja	Des-02	Mei-03	Rampung	240.898	231.483
15	NM-022	Konstruksi Jembatan Desa Gamsungi-1	Gamsungi-1, Tobelo Utara	CV Mangon	3	Sep-02	Des-02	Rampung	8.399	7.936
16	NM-023	Konstruksi Pasar Tradisional	Kupa-kupa, Tobelo Selatan	CV Semesta	4	Okt -02	Feb-02	Rampung	33.416	29.798
17	NM-024	Rehabilitasi Sistem Drainase	Kupa-kupa, Tobelo Selatan	CV Delya Aquarius	3	Okt -02	Jan-02	Rampung	22.929	21.552
18	NM-025	Insentif untuk Pekerja Kesehatan yang Pulang untuk Kinerja Profesional secara Berkesinambungan di Kabupaten Halteng	Halteng	WHO	1	Okt -02	Des-02	Rampung	8.448	7.872
19	NM-026	Konstruksi Lantai Pasar Tradisionil Tobelo	Desa Gamsungi-1, Tobelo Utara	CV Melati	2	Okt -02	Des-02	Rampung	7.790	7.280
20	NM-027	Perumahan dan Prasarana Terkait untuk Provinsi Malut	Malut	UNOPS	12	Jan-03	Des-03	Berjalan	3.310.358	TBD
21	NM-028	Sanitasi Komprehensif untuk Malut	Malut	Dinkes Malut, WHO, Dinkes-Universitas Khairun Ternate	6	Des-02	Mei-03	Rampung	33.236	30.969
22	NM-029	Sanitasi Komprehensif untuk Halteng	Malut	Dinkes Malut, WHO, Dinkes-Universitas Khairun Ternate	6	Des-02	Mei-03	Rampung	30.676	28.584
23	NM-030	Pemberdayaan Pemuda melalui Budaya dan Olahraga	Tobelo dan Galela	UNDP	1	Okt -02	Nov-02	Rampung	3.051	3.051
24	NM-031	Pemasangan Sistem Pengadaan Air Bersih di Soatobaru	Desa Soatobaru, Galela	Dewan Desa, PLN	1	Jan-03	Feb-03	Rampung	6.594	6.288
25	NM-032	Rehabilitasi Suplai Air di Duma	Desa Duma, Galela	Dewan Desa	4	Okt -02	Feb-03	Rampung	7.163	4.098
26	NM-033	Bangun Persaudaraan Cup I	Tobelo dan Galela	BP KNPI	1,5	Jan-03	Feb-03	Rampung	10.510	10.022
27	NM-034	Prakarsa Rehabilitasi Masyarakat Malut	Kab Malut	CARDI	12	Mar-03	Feb-04	Berjalan	499.917	199.967
28	NM-035	Rekonstruksi Gedung Sekolah & Perabot Sekolah di Soatobaru	Soatobaru, Galela	Dewan Desa	3	Apr-03	Juli-03	Berjalan	12.299	10.716
29	NM-036	Konstruksi Dermaga di Pulau Tolonuo	Desa Tolonuo, Tobelo	Dewan Desa	2	Feb-03	Apr-03	Rampung	11.338	10.780

No.	KODE PROYEK	JUDUL PROYEK	WILAYAH TARGET	MI TRA	STATUS	TOTAL KOMITMEN	TOTAL	PROYEKSI	No.	KODE PROYEK
				PENANGGUNGJAWAB PROYEK			PEMBAYARAN (Per 30-11-02)	PEMBAYARAN (Pada 12/02)		
30	NM-037	Penyaluran Bantuan untuk United Nations Resource Centre Ternate	Ternate	UNDP	21	Jan-03	Sep-04	Berjalan	229.500	30.816
31	NM-038	Koperasi Produksi Batu Bata	Desa Gomhoku, Tobelo Selatan	Dewan Desa & Dinas Perindag Malut	3	Apr-03	Juli-03	Berjalan	6.379	1.724
32	NM-039	Padat-Karya: Konstruksi Jalan & Parit di Duma	Galela	Pemerintah Desa	3	Sep-02	Des-02	Rampung	878	878
33	NM-040	Rehabilitasi Sistem Air di Desa-Desa Masyarakat Pengungsi yang Pulang	Galela, Tobelo, Tobelo Selatan	Dewan Desa	12	Sep-02	Aug-03	Berjalan	1.829	1.829
34	NM-041	Rehabilitasi Gedung SD INPRES di Desa Upa	Desa Upa, Tobelo	Pemerintah Desa, Dewan Sekolah	3	Apr-03	Juli-03	Berjalan	9.774	8.459
35	NM-042	Pelatihan Pemeriksaan Dahak secara Mikroskopis bagi Pekerja Kesehatan	Ternate, Malut dan Halteng	WHO	1	Juni-03	Juni-03	Rampung	28.000	27.671
36	NM-043	Pembinaan Budaya Damai di Wilayah Pasca Konflik Malut	Kab Malut	UNESCO	12	TBD	TBD	Belum Dimulai	52.884	0
37	NM-044	Kegiatan Orientasi Pramuka	Kec Tobelo	Organisasi Pramuka Malut	1	Juni-03	Juni-03	Rampung	1.258	1.185
38	NM-049	Pengembangan Kapasitas Guru dalam Pendidikan Perdamaian	Prov Malut	UNICEF/World Vision	9	Juni-03	Feb-04	Berjalan	93.598	18.216
39	NM-051	Pengembangan Kapasitas Produksi Minyak Kelapa di Upa	Desa Upa, Tobelo	Dinas Perindag Kab Halut	4	Mei-03	Sept-03	Berjalan	2.646	2.614
40	NM-052	Penyaluran Bantuan untuk Dinas Perindag Kabupaten	Tobelo, Halut	Dinas Perindag Kab Halut	6	Juni-03	Des-03	Berjalan	5.851	1.971
41	NM-063	Penyaluran Bantuan untuk Dinas Perikanan Kabupaten, Halut	Kab Halut	Dinas Perikanan Kab	6	Juli-03	Jan-04	Berjalan	6.707	2.073
42	NM-064	Penyaluran Bantuan untuk Dinas Peternakan Kabupaten, Halut	Kab Halut	Dinas Peternakan Kab	6	Juli-03	Jan-04	Berjalan	6.707	2.073
TOTAL MALUKU UTARA									5.679.328	1.477.614

Daftar Proyek di Maluku

1	M-001	Membantu Stabilitas, Pemulangan Pengungsi dan Pemberdayaan Ekonomi di Maluku	Maluku	Mercy Corps International (MCI)	12	Juli-02	Juli-03	Berjalan	203.538	183.184
1.5	M-001	Membantu Stabilitas, Pemulangan Pengungsi dan Pemberdayaan Ekonomi di Maluku -- Fase II	Maluku	Mercy Corps International (MCI)	18	TBD	Sep-04	Berjalan	230.000	0
2	M-002	Praktek Cara Suntik Aman dan Penyimpanan Obat dengan Pendingin di Propinsi Maluku	Maluku	WHO	1	Agu-02	Sep-02	Rampung	7.709	7.182
3	M-003	Memajukan Pemulihan Masyarakat dan Pemulangan Pengungsi secara Berkelanjutan lewat Proses Penciptaan Perdamaian	Seram, Maluku	ICMC	12	Jan-02	Jan-03	Berjalan	204.310	183.879
4	M-004	Penyaluran Bantuan kepada Anak Yatim-Piatu dan Anak Miskin	Maluku	Lakpesdam	1	Des-02	Des-02	Rampung	3.324	3.096

No.	KODE PROYEK	JUDUL PROYEK	WILAYAH TARGET	MITRA	STATUS	TOTAL KOMITMEN	TOTAL	PROYEKSI	No.	KODE PROYEK
				PENANGGUNGJAWAB PROYEK			PEMBAYARAN (Per 30-11-02)	PEMBAYARAN (Pada 12/02)		
5	M-005	Analisa Konflik dan Pengkajian Kapasitas Lokal untuk Mengembangkan Strategi Pemulihan untuk Maluku	Maluku	Institute for Social Transformation (INSIST)	3	Des-02	Mar-03	Berjalan	65.578	52,617
6	M-006	Lokakarya Perencanaan Skenario	Maluku	Lembaga Partisipasi Pembangunan Masyarakat (LPPM)	3 hari	Jan-03	Jan-03	Rampung	976	930
7	M-007	Tindak-Lanjut Lokakarya Perencanaan Skenario Maluku Baru 2020	Maluku	LPPM	2 hari	Jan-03	Mar-03	Berjalan	1.212	1,212
8	M-008	Pembersihan Lahan Parkir & Pertunjukan Tarian dan Nyanyian Adat	Ambon, Maluku	Tali Persaudaraan Maluku (TPM)	10 hari	Mar-03	Mar-03	Berjalan	2.338	2,117
9	M-009	Pemajuan Rekonsiliasi melalui Pendidikan di Maluku Pasca Konflik	Ambon, Maluku	Muhammadiyah	6 bulan	Mei-03	Nov-03	Berjalan	204.554	101,044
10	M-010	Rekonsiliasi melalui Pendidikan di Maluku	Ambon, Maluku	Kantor Walikota	12 bulan	Mei-03	Apr-04	Berjalan	226.649	67,175
11	M-011	Program Pengembangan Media Maluku	Maluku	Media Development Loan Fund	17 bulan	Mei-03	Okt-03	Berjalan	249.395	99,758
TOTAL MALUKU									1.399.581	700.986
TOTAL KESELURUHAN MALUKU UTARA & MALUKU									7.078.910	2.178.601

Lampiran II : Susunan Kepegawaian (Per Juni 2003)

Staf Jakarta	
Patrick Sweeting	Head, Conflict Prevention and Recovery Unit
Phillip Cooper	Programme Operations Manager
Maja Matulac-Suhud	Programme Officer –Maluku Utara
Djasinur Sirait	Programme Officer – Maluku
Yanawati Sinaga	Administration and Finance Officer
Supinah	Administration and Finance Assistant
Rismawati Mangunsong	Secretary
Staf Maluku Utara (Ternate)	
Murray Wilson	Recovery Programme Manager (Maluku Utara)
Jopie Sinanu	Area Projects Manager
Roswita Aboe	Administrative Assistant
Enardson Layang	Engineering Officer
Ichsan Barmawi	Driver
Staf Maluku Utara (Ternate – UNRC)	
Rini Indrayanti	UNRC Field Assistant
Devi Suryani	UNRC Secretary
Djainuddin Kasim	UNRC Security Guard
Hamzah Supria	UNRC Security Guard
Suyati	UNRC Office Helper
Staf Maluku Utara (Tobeloo)	
Karen Janjua	Area Projects Manager
H. Mohammad Sabar	National Programme Officer/Technical
Freddy Buntaran	Programme Officer
Thamrin Hanafi	Public Relation Programme Officer
Baskoro Margosuro	Logistic/Operations Manager
Meriza Hutabarat	Admin/Finance Officer
Linda J. Sumarauw	Programme Assistant
Ronald Suhartono Sutedjo	Operations/Logistics Assistant
Christian Usfinit	Technical Assistant
Hilman Gobel	Translation Services
Komar E. Tuange	Driver
Sarip Aklan	National UNV
Pandu Hartoyo	National UNV
Darwan Suleman	Security Guard
Djames HB Silangen	Security Guard
Tomitha Mahura	Security Guard
Veronica Sambode	Helper
Staf Maluku (Ambon)	
Richard Manning	Recovery Programme Manager (Maluku)
Caroline Tupamahu	Administration/Finance Officer
Madja Rumatiga	Programme Officer
Wismanno P.K Simaela	Programme Officer
Nuraini Soulisa	Research and Information Management Officer
Basit Iating	Maintenance Assistant
Marlon Ririhena	Security Guard
Staf Maluku (Masohi)	
Yusran Laitupa	Programme Officer
Devy Erlina Nazwir	Programme Assistant
Staf Maluku (Tual)	
Joko Subanarto	Programme Officer
Moses Tjoanda	Admin/Finance Officer
Esther Rahayaan	Liaison Officer
Herman Ohoirat	Security Guard
Britus Wearbitu	Security Guard
Ahmad Lani Banyal	Driver
Konsultan Jangka Pendek	
Hasan Hasrabun	Electrification Consultant
Irawati Hapsari	Media Campaign Consultant